

KORAN
DIGITAL

radar.

EDISI RABU
18 OKT 2023

MEDIA

T E R D E P A N



CHINA MINAT GARAP PERUMAHAN & KESEHATAN DI IKN



SELURUH PUSKESMAS SE-KALTIM WAJIB TERAKREDITASI

Bazar UMKM Kutim Sampai di Titik Terakhir Sangatta Utara, Terus Konsisten Angkat Perekonomian Rakyat



SANGATTA - Rangkaian kegiatan Bazar UMKM Kutim kini sudah di titik terakhir penyelenggaraannya. Sebanyak 18 titik yang disinggahi panitia dari Diskop UMKM Kutim bekerja sama dengan Genpro Indonesia sudah dilalui. Kegiatan dipusatkan di Lapangan Helipad Kantor Bupati Kutim, Senin (16/10/2023).

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman didampingi Kepala Diskop UMKM Kutim Darsafani, Ketua Global Entrepreneur Profesional (Genpro) Kalimantan Timur (Kaltim) Jhony Arianto hingga undangan lainnya membuka langsung kegiatan ini. Ia pun meminta data dari 18 kecamatan yang sudah menggelar Bazar UMKM.

"Segera saya minta, berapa data UMKM yang terlibat. Ini penting sebagai bahan evaluasi jadi ke depannya bisa memutuskan cepat kegiatan selanjutnya karena tentunya banyak UMKM tumbuh," urainya.

Kemudian, ia juga meminta berapa UMKM yang bersumber dari dana Rp 50 juta per RT. Kemudian, berapa UMKM yang sudah dikurasi dan berapa produk dari UMKM dari segi kategori kuliner kreatif hingga inovasi lainnya.

"Produk ini yang harus kita ketahui cepat. Kita sudah punya produk yang sudah dikurasi seperti madu kelulut, jahe, gula merah cair dan lainnya. Produk ini pun sudah dipromosikan di pameran UMKM di Bali dan Jakarta. Saya minta harus dikawal dan ada komunikasi maksimal karena ini perlu ditekankan selain roda transaksi di lapangan, kita mau muncul UMKM Kutim muncul dan bisa mengisi pasar regional, hasil dari bazar keliling di 18 kecamatan," bebernya.

Kemudian, arahan Ardiansyah, ia kembali menegaskan jika tidak ada event ini, UMKM ini berjalan di tempat. Event ini harus konsisten dalam mengangkat perekonomian rakyat.

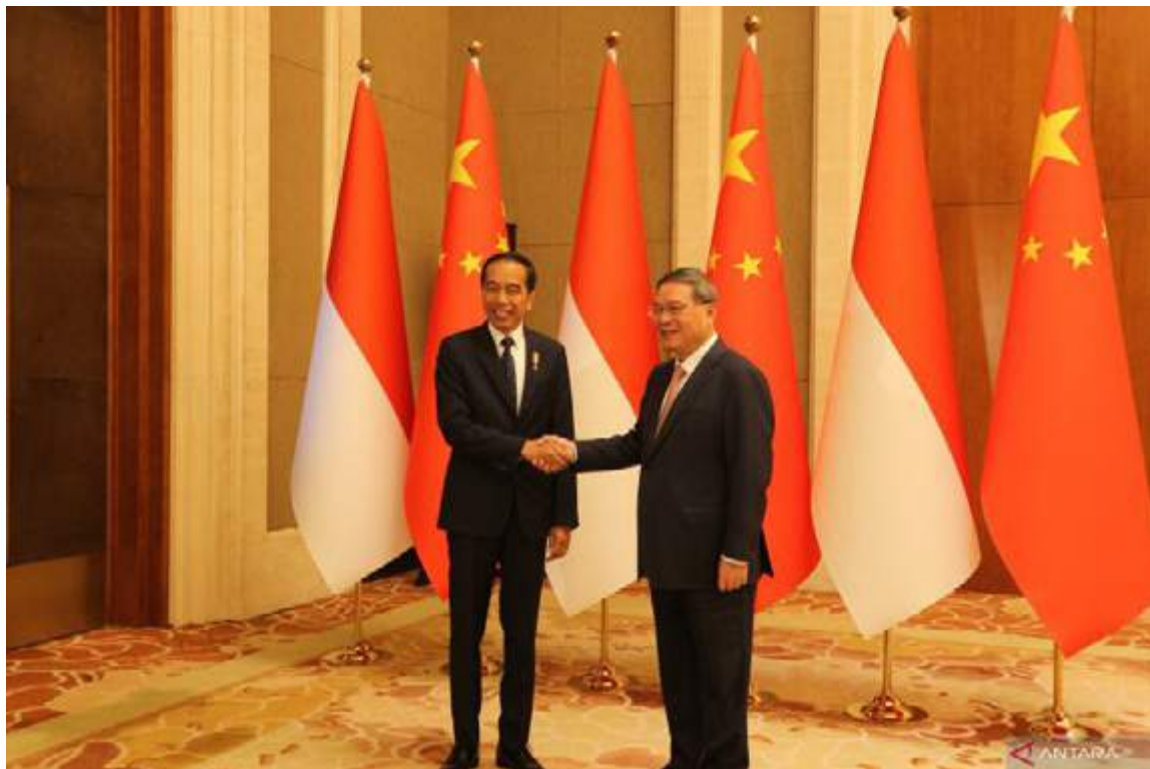
"Adanya arena bazar ini saya merasa yakin punya arena sama kayak atlet olahraga ketika bertanding. Makanya kita ciptakan adanya Turnamen Sepak Bola Piala Bupati Cup Kutim setiap tahun. Ini tujuannya cara Kutim mendukung IKN Kaltim. Jadi kita ciptakan event-event, yang saya harap menjadi kiblat olahraga dengan dilatih pelatih nasional," terangnya.

Senada, Kepala Diskop UMKM Kutim Darsafani melaporkan kegiatan bazar sudah mencapai

titik terakhir atau titik ke-18. Ia pun mengutarakan selain menggelar kegiatan bazar ini, pihaknya sudah melaksanakan pelatihan juga studi tiru hingga forum diskusi daerah dalam mengevaluasi kegiatan apa-apa saja yang harus dibenahi.

"Ke depan kita akan gelar event lebih kreatif, nanti di anggaran perubahan kita akan menggelar beberapa pelatihan. Intinya dalam penataan ekonomi kerakyatan. Kemudian kita juga fokus dalam bagaimana memberikan modal bisa untuk hibah atau pendampingan dari perbankan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Harapannya kegiatan ini terus menjadi unggulan Kutim, karena saya menyakini bahwa reward dari Kemenkeu dalam pengendalian inflasi hanya diberikan kepada Kutim dan Kukar," jelasnya.

"Dan ini salah satunya kegiatan kita bisa melakukan bazar dan warga bisa terus melakukan transaksi dan ini menjadi indikator inflasi bisa dikendalikan. Karena yang dinilai salah satunya usaha pemerintah daerah. Untuk itu, kita bukan buang waktu atau program, banyak hal yang kita dapatkan munculkan," tegasnya. **(RKT)**



PRESIDEN JOKOWI APRESIASI MINAT CHINA DI IKN SAAT BERTEMU PM LI QIANG

BEIJING - Presiden Joko Widodo mengapresiasi minat China untuk berinvestasi pada sektor perumahan dan kesehatan di Ibu Kota Nusantara (IKN) saat bertemu dengan Perdana Menteri Li Qiang di Beijing.

"Saya mengapresiasi kerja sama design planning antara Otoritas Ibu Kota Nusantara dan Kota Shenzhen, serta minat swasta China di Ibu Kota Nusantara untuk bidang perumahan dan kesehatan," kata Jokowi di Diaoyutai State Guest House, Beijing, China, Selasa.

IKN telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kota Shenzhen, yang dalam 40 tahun terakhir bertransformasi dari kota kecil menjadi metropolis, dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia di Pulau Kalimantan tersebut.

"Juga mohon dukungan Yang Mulia untuk mendorong percepatan realisasi investasi di Ibu Kota Nusantara," tambah Jokowi. Jokowi juga mengaku sen-

ang dapat kembali bertemu dengan Li Qiang setelah mereka jumpa saat KTT ASEAN pada September 2023.

"Sekali lagi saya mengapresiasi perkembangan positif kemitraan strategis komprehensif selama 10 tahun terakhir, di mana China menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dan China juga menjadi investor terbesar kedua di Indonesia," ungkap Jokowi.

Kerja sama yang kuat tersebut, menurut Jokowi, berkontribusi pada penguatan kerja sama regional dan internasional.

"Di mana perdamaian dan stabilitas menjadi isu utama," ujarnya. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ad interim yang juga Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Sementara turut mendampingi Li Qiang ialah Wakil Menteri

Luar Negeri Ma Zhaoxu, Menteri Pertanian dan Desa Tang Renjian, Wakil Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Cong Liang, Duta Besar RI untuk China Lu Kang, Direktur Kantor Perdana Menteri Kang Xuping, Direktur Jenderal Departemen ASEAN Kementerian Luar Negeri China Li Jinsong, dan Asisten Menteri Luar Negeri Nong Rong.

Pada tanggal 6 September 2023, Li Qiang juga telah menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bersama dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Kemudian pada tanggal 8 September 2023, Li Qiang bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Selanjutnya, pada tanggal 16 September 2023, Li Qiang juga bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam kunjungannya di Nanning, China, untuk membahas investasi kereta cepat hingga mobil listrik.

Pewarta : Desca Lidya Natalia
Editor : Fransiska Ninditya



Rangkaian Kegiatan Benchmarking di Yogyakarta

BELAJAR DARI BPBD DIY, PESERTA PELATIHAN TINGKATKAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KALTIM

YOGYAKARTA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim menyelenggarakan kegiatan Benchmarking ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bagi Peserta Pelatihan Dasar Manajemen Bencana tahun 2023 Provinsi Kaltim. Kegiatan ini berlangsung, Selasa (17/10/2023) di Yogyakarta.

Hadir dalam kegiatan Benchmarking tersebut Plt. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DIY, Drs. Noviar Rahmad, M.Si, Sekretaris BPBD Provinsi DIY, Marlina Handayani, S.Pd, MM, Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi DIY, Lilik Andi Ariyanto, S.IP, MM, serta jajaran BPBD Provinsi DIY, pejabat administrator, widyaiswara BPSDM Kaltim, dan analis Bangkom BPSDM Provinsi Kaltim, panitia penyelenggara dari Bidang PKT BPSDM Kaltim, serta peserta.

"Peserta Pelatihan Dasar Manajemen Bencana yang berbahagia, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas limpahan rahmat-Nya, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka Benchmarking Peserta Pelatihan Dasar Manajemen

Bencana di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun 2023," ujar Kepala BPSDM Kaltim Dra. Nina Dewi, MAP saat memberikan sambutan pembukaan Benchmarking.

Nina Dewi menjelaskan bahwa kegiatan benchmarking ini merupakan rangkaian pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana yang telah dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 09 sampai dengan 12 Oktober 2023 lalu.

"Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk belajar dari pengalaman BPBD Provinsi DIY mengenai proses dan sistem manajemen operasional pada penanggulangan bencana," katanya.

Dalam kegiatan benchmarking ini, peserta akan melihat praktik terbaik yang telah diterapkan BPBD DIY. Peserta akan mendiskusikan strategi penanggulangan bencana yang telah teruji, teknologi yang digunakan dalam pemantauan dan peringatan dini, serta cara terbaik untuk melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

"Saya yakin, hasil dari kegiatan benchmarking ini akan menjadi lan-

dasan yang kuat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respon cepat kita dalam menghadapi bencana di masa depan," pungkasnya.

Nina Dewi berharap semua peserta yang telah hadir dan berkontribusi dalam acara ini dapat mengikuti sesi benchmarking ini dengan semangat dan keterbukaan untuk belajar satu sama lain.

"Selamat mengikuti acara ini, dan mari kita berkolaborasi untuk mewujudkan Masyarakat Tangguh Bencana karena Bencana adalah Urusan Kita Bersama," tutupnya.

Diketahui, Benchmarking adalah praktik membandingkan ukuran kinerja utama, tren, dan proses manajemen dengan organisasi sejenis. Ini adalah alat yang sangat berharga untuk mengukur keberhasilan kinerja suatu Organisasi dan area potensial untuk perbaikan.

Kegiatan dalam Benchmarking adalah membandingkan suatu kegiatan antar organisasi yang telah dicapai untuk meraih formula yang baru dan pas bagi peserta Benchmarking untuk dipraktikkan di daerahnya. (Han/ADV/BPSDM)

Pewarta: Hanaf

Editor: Agus Susanto



Buku 'Numerasi Batu Bertulis Yupa' Ditulis 3 Akademisi Kaltim: Ungkap Sejarah Kerajaan Martapura di Kutai



Buku "NUMERASI BATU BERTULIS YUPA" tentang Kerajaan Martapura di Kutai, Kalimantan Timur, ditulis tiga akademisi dari Samarinda, yaitu Fitria Nurul Hidayah, Kurniawan, dan Yulian Widya Saputra.

SAMARINDA - Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) baru-baru ini menerima kedatangan dua penulis Kaltim. Kedatangan para penulis ini diterima dengan baik oleh Pustakawan Ahli Muda Fatimah Irny di Ruang Seksi Deposit dan Alih Media yang terletak di Lantai 3.

Fatimah menjelaskan tujuan kedatangan mereka adalah menyumbangkan buku hasil penelitian mereka terkait sejarah di Kaltim, khususnya mengenai tugu batu yupa yang pernah ditemukan di bantaran Sungai Mahakam di Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara.

"Buku tersebut berjudul 'NUMERASI BATU BERTULIS YUPA,' yang membahas tentang kerajaan Martapura di Kutai, Kalimantan Timur," ungkapnya.

Fatimah mengaku sangat bangga dengan para penulis asal Kaltim ini, yang semuanya merupakan dosen di lembaga universitas yang ada di Kaltim. Ini karena sangat sedikit penulis yang memberikan perhatian terhadap peninggalan bersejarah seperti tugu batu yupa yang banyak ditemukan di Kaltim, terutama di Kutai Kartanegara.

"Tentu saja, buku ini akan lebih memperkaya koleksi konten lokal dan khasanah kearifan lokal Kalimantan Timur. Penelitian tiga akademisi ini berfokus pada prasasti Yupa, membawa pengetahuan baru dalam bidang matematika dan unsur-unsur etnomatematika," ujarnya.

Penulis buku "NUMERASI BATU BERTULIS YUPA" tentang kerajaan Martapura di Kutai, Kaltim, adalah tiga orang aka-

demisi dari Samarinda, yaitu Fitria Nurul Hidayah, Kurniawan, dan Yulian Widya Saputra.

Fitria Nurul Hidayah adalah seorang dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, sementara Kurniawan dan Yulian Widya Saputra keduanya adalah dosen di Program Studi Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) serta Program Studi Matematika Universitas Mulawarman (Unmul).

Para penulis menemukan penomoran bilangan matematika yang dulunya ditulis dalam bentuk kata-kata, tetapi dalam huruf Pallawa berbahasa Sanskerta di atas Yupa, sebuah tongkat batuan beku monolit, yang merupakan peninggalan kerajaan Martapura di Kutai.

Tim penulis menghadapi kendala dalam menggarap tulisan ini, terutama dalam proses pencarian alih aksara Kuno, karena tidak semua orang memahami aksara tersebut. Selain itu, mereka juga melakukan wawancara dengan ahli sejarah, yang memakan waktu satu tahun untuk berproses dengan ahli aksara Kuno yang ada di Museum Nasional.

"Mereka harus menyesuaikan jadwal pertemuan dengan beliau karena memang orang yang menguasai aksara Kuno tersebut sangat langka, bahkan ada yang berada di Kaltim. Beliau membantu kami dalam penulisan huruf Pallawa, karena saat ini hampir tidak ada yang memahami Bahasa Sanskerta," kata salah seorang penulis, Kurniawan.

Buku yang mengkaji numerasi ini di-

kaji melalui pendekatan ilmu sejarah dan dipadukan dengan multidisiplin ilmu, seperti geografi dan matematika (etnomatematika).

Diharapkan keterpaduan ketiga disiplin ilmu ini dapat mengungkap kegiatan numerasi masyarakat nusantara yang terwakili oleh kerajaan Martapura (Kutai Kuno) di Kalimantan Timur.

"Prasasti Yupa menggunakan Bahasa Sanskerta dengan Aksara Pallawa. Numerasi yang ditemukan berhubungan dengan kuantitas dan bilangan," ujar Kurniawan.

Numerasi Kerajaan Kutai pada masa Hindu-Buddha abad ke-5 Masehi dalam teks Sanskerta diartikan sebagai "Aika," yang dalam Bahasa Indonesia berarti "Satu." Kata "Dasa" berarti sepuluh. "Aikadasa" berarti sebelas. Kosakata "aika," "dwi," "tri," dan seterusnya memiliki arti urutan atau penomoran anak dalam sebuah keluarga, selain itu, juga memiliki makna sebagai tanggal lahir seseorang.

Dulu, "Aika" menandakan angka satu, namun pada zaman sekarang ada perubahan fonem menjadi "Eka," yang menandakan anak pertama atau angka satu. Pagi ini, bersama dua penulis dan pengunjung, mereka dengan penuh semangat berharap bahwa buku yang mereka sumbangkan dapat dibaca oleh masyarakat luas, terutama masyarakat Kaltim.

"Masyarakat perlu mengetahui bahwa di Kaltim ini ada aksara Kuno yang tertulis di batu Yupa," pungkas Kurniawan. (ADV/Han/DPKD).

Pewarta: Hanaf
Editor: Agus Susanto



**SELURUH PUSKESMAS
SE-KALTIM WAJIB
TERAKREDITASI**



Dinkes galakkan penurunan stunting di Kaltim. (Istimewa)

ANGKA STUNTING DI KALTIM TINGGI, DINKES LAKUKAN PANTAUAN GIZI D/S

SAMARINDA- Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) membahas peningkatan capaian program gizi dengan istilah D/S. D adalah jumlah balita yang ditimbang dan S adalah jumlah semua balita yang berada di wilayah kerja.

"Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan kesehatan bayi dan balita melalui kegiatan posyandu," ungkap Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kaltim Muhammad Maulana Fahmi, Senin (9/10/2023).

Fahmi mengatakan, pemantauan pertumbuhan adalah salah satu kegiatan utama program dalam perbaikan gizi, yang menitikberatkan pada upaya pencegahan dan peningkatan keadaan gizi anak.

Dikemukakannya, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan tahun 2022, prevalensi balita stunting di Kaltim mencapai 23,9 persen, menempati peringkat ke-16 tertinggi secara nasional.

Untuk angka tersebut masih tergolong tinggi, menurut Organisasi Kesehatan Dunia

(WHO), yang menetapkan batas aman prevalensi stunting maksimal 20 persen.

"Kami ingin menurunkan angka stunting di Kaltim, khususnya di wilayah calon ibu kota baru dan sekitarnya," jelasnya.

Fahmi juga menjelaskan, pemantauan status gizi pada balita dilakukan dengan memanfaatkan data hasil penimbangan posyandu setiap bulan berdasarkan indikator SKDN, di mana S adalah sasaran balita di suatu wilayah, K artinya balita yang memiliki Kartu Menuju Sehat (KMS), D yaitu balita yang ditimbang berat badannya, dan N adalah balita yang ditimbang dan naik berat badannya.

"Kami juga ingin meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat di Posyandu," bebernya. Sementara itu, pertemuan peningkatan capaian D/S tingkat provinsi itu berlangsung dari tanggal 9-11 Oktober 2023. Diikuti oleh 33 peserta yang terdiri dari 20 peserta dari kabupaten/kota dan 13 peserta dari provinsi. Peserta berasal dari lintas sektor dan lintas program Dinas Kesehatan Kaltim. **(Nta/adv/Dinkes)**

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari



Rumah sakit Sepaku merupakan kesehatan untuk melayani pekerja yang ada di IKN. (Media Kaltim)

PERSIAPAN IKN, DINKES KALTIM BAKAL PENUHI KEBUTUHAN SDM RUMAH SAKIT SEPAKU

SAMARINDA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mempersiapkan fasilitas kesehatan yang ada di Ibu Kota Nusantara (IKN). Di kawasan Sepaku saat ini hanya ada satu Rumah Sakit kelas D, dan ada 5 Puskesmas.

"Kami masih terus berbenah untuk fasilitas kesehatan yang ada di sana. Apalagi untuk menyambut IKN, tentu seperti rumah sakit kelas D akan menjadi kelas C," ungkap Kepala Bidang Fasyankes Dinas Kesehatan Kaltim Dr Rony Setiawati, Selasa (10/10/2023).

Pemerintah daerah pun tak hanya menyerahkan ke Kementerian Kesehatan, tetapi juga menyiapkan anggaran untuk membantu rumah sakit yang berada di IKN, dalam program Major Project.

"Ya jadi major project itu merupakan

program gubernur Kaltim kepemimpinan Isran-Hadi. Di mana, dalam program tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu fasilitas kesehatan," bebernya.

Diketahui, anggaran sarana prasarana telah disiapkan sebesar Rp10 miliar se-Kaltim, dari 2024-2026.

Akan tetapi dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk daerah IKN belum mencukupi. Sedangkan, sarana prasarana seperti tempat tidur pasien rumah sakit belum memenuhi, dan akan ditingkatkan sebelum tahun 2024.

"Untuk upaya dinas kesehatan Kaltim sendiri, tentu terkait penyediaan SDM, sarana prasarana harus dipenuhi semua," pungkasnya. **(Nta/adv/Dinkes)**

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala Bidang Fasyankes Dinas Kesehatan Kaltim Dr Rony Setiawati. (Media Kaltim)

SELURUH PUSKESMAS SE-KALTIM WAJIB TERAKREDITASI

SAMARINDA- Ada sebanyak 188 Puskesmas yang ada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, masih tersisa 6 Puskesmas yang belum memiliki akreditasi.

Kepala Bidang Fasyankes Dinas Kesehatan Kaltim Dr Rony Setiawati mengatakan, sejak tahun 2022 seluruh fasilitas kesehatan diwajibkan memiliki akreditasi. Sehingga masih ada 6 puskesmas dari 188 yang belum terakreditasi.

"Kementerian kesehatan membentuk 13 lembaga yang akan menilai puskesmas tersebut. Dan di tahun ini akan ada 4 puskesmas yang akan diakreditasi," jelas dr Rony

Setiawati, Selasa (10/9/2023).

Lebih lanjut, untuk pembiayaan akreditasi akan dibebankan kepada pemerintah kabupaten/kota. Di mana jika sebelumnya, biaya akreditasi dibebankan kepada pemerintah pusat.

"Nantinya akan ada 5 penilaian untuk akreditasi, seperti paripurna, utama, madya, dan dasar. Jadi tidak ada puskesmas yang tidak lolos akreditasi, hanya saja penilaian setiap puskesmas berbeda," tutupnya. **(Nta/adv/Dinkes)**

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari



Setiap lima tahun sekali puskesmas wajib melakukan akreditasi ulang. (Istimewa)

Empat Puskesmas di Kaltim Jalani Proses Akreditasi

SAMARINDA- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim) menyebutkan ada empat Puskesmas menjalani proses survei akreditasi.

"Survei akreditasi dilakukan oleh lembaga independen, yaitu lembaga penyelenggara akreditasi jumlahnya ada 13 lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan guna menilai Puskesmas dari segi mutu dan sesuai standar," jelas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kaltim Dr Ronny Setiawati, Jumat (13/10/2023).

Akreditasi Puskesmas adalah proses penilaian secara sistematis dan komprehensif terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan pasien serta memenuhi standar nasional.

"Ada empat tingkat akreditasi Puskemas, yaitu Paripurna, utama, Madya, dan Dasar. Tingkat akreditasi ini ditentukan berdasarkan hasil dari LAN dan Kementerian Kesehatan," ujarnya.

Lebih lanjut, untuk Puskesmas yang sudah terakreditasi, harus melakukan penilaian kembali setiap lima tahun sekali. Ini sesuai dengan regulasi terbaru yang berlaku sejak tahun 2019.

"Semua fasilitas pelayanan kesehatan wajib terakreditasi, baik itu Puskesmas maupun rumah sakit. Ini penting untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan sesuai standar kepada masyarakat," pungkasnya. (adv)

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari



PEMKAB PPU KOORDINASI DENGAN KLHK TANGANI KARHUTLA



**HADIRI GRAND OPENING BNI KCP SEPAKU,
SEKKAB PPU; KONTRIBUSI PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH**



Rapat koordinasi beberapa unsur di lingkup Pemkab PPU dan KLHK secara virtual. (Robbi/MediaKaltimGroup)

PEMKAB PPU KOORDINASI DENGAN KLHK TANGANI KARHUTLA

PPU - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada 2023 ini masih terbilang tinggi. Untuk itu, Pemkab PPU berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam penanganan dan pencegahannya.

Menurut data pusat pengendalian dan operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU, kejadian karhutla dalam rentang waktu 2023 sebanyak 90 kali. Dengan total luas sebanyak 208,35 hektare.

"Untuk menekan intensitas karhutla tersebut Kami kembali mengambil langkah cepat dan tepat dengan melakukan koordinasi terpadu," ujar Pj Bupati PPU, Makmur Marbun (17/10/2023).

Adapun pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementeri-

an Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Thomas Nifinluri. Kemudian juga dengan Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Wilayah Kalimantan Yudho Sekti Mustiko, Kepala Seksi wilayah III Kaltimarta Balai PPI Wilayah Kalimantan.

Makmur mengatakan tingginya intensitas karhutla di wilayah PPU memerlukan tindakan konkret dalam menekan tingginya kasus tersebut. Untuk menekannya, sambungnya, perlu adanya berkolaborasi dari semua pihak dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya.

"Ini merupakan langkah proaktif, menjaga kelestarian alam dan melindungi masyarakat dari dampak yang mungkin timbul," jelasnya.

Dari komunikasi itu, diketahui KLHK siap mendukung kekuatan personil sarana dan prasarana. Serta melakukan upaya pence-

gahan karhutla secara permanen dengan melakukan indentifikasi pemantauan dan deteksi dini di wilayah yang rawan.

Selain itu, Pemkab PPU juga akan melakukan revitalisasi sarana dan prasarana penanganan karhutla secara bertahap. Kemudian juga akan dibentuk lagi tim tangguh bencana, yang diawali dengan pembentukan desa tangguh bencana (destana).

Kemudian juga dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA). Serta Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang merupakan bagian dari program pembentukan destana.

"Tetap dengan melakukan harmonisasi program Kementerian Lingkungan LHK dengan program BPBD serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan," pungkas Makmur. (ADV/SBK)



Sekcab PPU Tohar saat menghadiri Gran Opening BNI KCP Sepaku, Selasa (17/10/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

HADIRI GRAND OPENING BNI KCP SEPAKU, SEKKAB PPU; KONTRIBUSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) mendukung hadirnya industri perbankan di wilayah Kecamatan Sepaku. Hal ini memastikan adanya dukungan finansial warga di sana dalam mengembangkan usahanya.

Sekcab PPU, Tohar menghadiri kegiatan Grand Opening Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sepaku, kabupaten PPU, Selasa, (17/10/2023). Ia mengatakan pemerintah daerah menyambut baik serta menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran BNI yang telah berkontribusi dalam upaya mendorong pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

"Keberadaan BNI di Sepaku tentunya akan sangat relevan dalam mendukung infrastruktur finansial yang diperlukan untuk memfasilitasi perkembangan ekonomi dan investasi di sekitar kawasan ini," ujarnya.

Selain itu, BNI KCP Sepaku ini juga merupakan salah satu langkah menuju pembangunan yang lebih besar dan berdampak luas di wilayah PPU. Terutama dengan adanya proyek monumental, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku

tambah dia tidak hanya menjadi proyek nasional yang luar biasa, tetapi juga membawa potensi perkembangan signifikan bagi PPU," jelasnya.

Selain itu, adanya BNI KCP Sepaku juga akan membantu para pelaku bisnis lokal dan nasional. Untuk dapat memiliki akses yang lebih mudah dan efisien, dalam pelayanan keuangan yang mendukung perkembangan proyek IKN.

"Saya yakin dan percaya bahwa BNI sebagai mitra finansial yang handal, akan dapat berperan penting dalam mendukung transaksi keuangan, investasi, dan perkembangan usaha di sekitar kawasan IKN Nusantara," terang Tohar.

Sementara itu Direktur Network dan Services PT BNI Persero Tbk, Rony Venir berharap BNI mampu berkontribusi bagi daerah khususnya di PPU. Ia juga mengatakan bahwa pembangunan BNI KCP Sepaku telah melalui tahapan dengan konsep yang berbeda.

"Mudah-mudahan dengan hadirnya BNI di kecamatan sepaku ini bisa meningkatkan perekonomian di wilayah IKN, khususnya di kecamatan sepaku, kabupaten PPU," tutupnya. (ADV/SBK)



Sosialisasi SP4N-LAPOR! diikuti oleh para aparaturnya desa/kelurahan, Selasa (17/10/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

DISKOMINFO PPU GELAR SOSIALISASI SP4N-LAPOR! DI KECAMATAN WARU

PPU - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N – LAPOR!) pada kelurahan dan desa di Kecamatan Waru, Selasa (17/10/2023).

Sekretaris Diskominfo PPU Herlambang, mengatakan saat ini kita memasuki era keterbukaan informasi. Sehingga dengan tujuan pemerintah kaitannya dengan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kita dituntut untuk serba tahu dan serba bisa.

"Agar pemahaman kita sama terhadap keterbukaan informasi publik dan menjadi simbiosis mutualisme antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu perlu berikan sosialisasi terkait kebebasan berpendapat, melaporkan, dan kebebasan mengadakan sesuatu," ungkapnya.

Sosialisasi SP4N-LAPOR! merupakan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan di empat ke-

camatan se-PPU. Dari kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pemerintah ke masyarakat setempat.

"Kami berharap sosialisasi ini dapat diikuti dengan baik dan terkumpul keingintahuan bapak ibu terhadap SP4N-LAPOR! serta ucapan terima kasih kepada Kecamatan Waru telah memfasilitasi kegiatan ini," tutur Herlambang.

Sementara itu, Pranata Humas Ahli Muda pada Diskominfo PPU Roinald Pagayang menambahkan sosialisasi SP4N-LAPOR! untuk mengenalkan aparat desa/kelurahan adanya aplikasi. Yang dapat dijadikan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik Nasional.

"Melalui SP4N pemerintah daerah mendapatkan masukan dari masyarakat, penyelenggara memiliki kesempatan melakukan segala macam perbaikan, penyelenggara pelayanan publik memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi sebuah peluang untuk memulihkan dan meningkatkan kepuasan serta masyarakat per-

caya pada kinerja pemerintah dan membangun citra positif di mata masyarakat," ungkapnya.

Lebih lanjut, SP4N-LAPOR! bertujuan agar penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat. Secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik,

"Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik," jelas Roinald.

Nantinya lanjut Roinald masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dan aspirasinya melalui laman website www.lapor.go.id. Atau melalui SMS dengan ketik PPU (spasi) isi laporan kirim ke 1708 serta melalui aplikasi android yang dapat di download di Play Store dan App Store untuk iOS.

"Diharapkan layanan aspirasi dan pengaduan SP4N-LAPOR) menjadi satu-satunya kanal aduan layanan publik yang berbasis digital dan digunakan seluruh instansi Pemerintah," pungkasnya.

(ADV/SBK)



Para pegawai kehumasan dan BKPSDM PPU mengikuti gelaran workshop, Selasa (17/10/2023). (Diskominfo PPU for MediaKaltimGroup)

PEMKAB PPU KIRIMKAN PRANATA HUMAS IKUTI WORKSHOP PRANATA HUMAS SE-KALTIM

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) mengirimkan pejabat fungsional hubungan masyarakat (Humas) untuk peningkatan kompetensi kehumasan. Dalam kegiatan Workshop Pranata Humas yang digelar Diskominfo Kaltim, Selasa (17/10/2023)

Adapun yang dikirimkan dalam kegiatan kali ini selain pegawai humas, juga pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU yang membidangi jabatan fungsional.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal menyampaikan setelah adanya kebijakan penyetaraan jabatan struktural ke fungsional, telah banyak peraturan baru yang mencabut peraturan lama. Sehingga perlu adanya sosialisasi terkait kebijakan tersebut termasuk peraturan mengenai angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional.

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 1/2023 tentang Jabatan Fungsional dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jabatan Fungsional.

"Berdasarkan peraturan tersebut juga, mulai 2023 angka kredit konvensional juga diperoleh dari penilaian kerja dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sehingga tidak ada lagi penilaian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)," ucapnya.

Workshop Pranata Hubungan Masyarakat Seluruh Kaltim 2023 digelar di Balikpapan. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pranata humas serta menyamakan persepsi mengenai beberapa mekanisme. Seperti penyesuaian angka kredit konvensional yang dikonversikan ke dalam angka kredit integrasi serta penetapan angka kredit integrasi dalam penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pranata Humas melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pranata Humas

yang Profesional dan Inovatif (SIMPHONI) Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Lebih lanjut, sosialisasi mengenai peraturan baru yang dijelaskan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Workshop ini juga menambah pengetahuan peserta mengenai media sosial dan pelayanan publik dengan menghadirkan Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman Hairunisa.

Faisal menyebut bahwa kebijakan penyetaraan jabatan dalam jabatan fungsional pranata humas harus diikuti dengan penyetaraan pengetahuan mengenai kehumasan. Ia berharap para pranata humas hasil penyetaraan dapat terus meningkatkan pengetahuannya sehingga dapat melaksanakan pekerjaannya dengan maksimal.

"Ini merupakan tantangan bagi pranata humas dan PR bagi kami dalam penyetaraan dari berbagai latar pendidikan," tutup Faisal. (ADV/SBK)



HADIRI APEL OPS MANTAP BRATA, KETUA DPRD KUKAR HARAP PEMILU 2024 BERJALAN AMAN DAN DAMAI



Sejumlah Program Disiapkan
Mangkurawang, Mulai Normalisasi dan
Bantuan Perikanan



Peserta Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Mahakam 2023-2024. (Istimewa)

HADIRI APEL OPS MANTAP BRATA, KETUA DPRD KUKAR HARAP PEMILU 2024 BERJALAN AMAN DAN DAMAI

TENGGARONG - Jelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024 yang berlangsung pada Februari 2024 mendatang, Polres Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Mahakam 2023-2024, di Halaman Parkir Stadion Rondong Demang Tenggarong, pada Selasa (17/10/2023).

Turut hadir Staf Ahli Bidang Umum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar Ahyani Fadrianur Diani, Dandim 0906/Kukar Letkol (Inf) Jeffry Satria, beberapa perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar. Termasuk Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid.

Dengan adanya Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Mahakam 2023-2024, Abdul Rasid, berharap seluruh pihak bisa saling bersinergi. Memastikan situasi dan kondisi (sikon) Kukar tetap aman, nyaman dan damai. Ini pun juga menandakan bahwa aparat keamanan kepolisian dalam hal ini Polres Kukar sangat siap dalam men-

amankan Pemilu 2024.

"Tetapi yang terpenting untuk menjaga kondusifitas Kukar ini bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri, tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat Kukar," ujar Rasid, Selasa (17/10/2023).

Orang nomor satu di DPRD Kukar inipun, mengimbau dan berharap masyarakat bisa menjaga dirinya masing-masing. Tidak mudah termakan isu-isu yang mengarah kepada perpecahan. Meskipun berbeda pilihan, namun tetap menjunjung tinggi kondusifitas Kukar.

"Sama-sama menjaga Kukar ini agar tetap aman dan tertib," tutupnya.

Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Mahakam 2023-2024 sendiri dipimpin langsung oleh Kapolres Kukar, AKBP Hari Rosena. Diikuti ratusan peserta yang berasal dari Polres Kukar, Senkom Polres Kukar dan organisasi masyarakat (ormas). (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i



Lurah Melayu, Aditya Rahkman. (Istimewa)

Kelurahan Melayu Kembangkan 5 Unit Bank Sampah, Sumber Pemasukan Baru Warga

TENGGARONG - Pengembangan bank sampah coba dilakukan oleh Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong. Menjadikan tumpukan sampah yang tidak berharga, menjadi salah satu sumber pendapatan baru bagi warga dalam pengelolaan bank sampah. Untuk saat ini, sedang dalam proses pencarian lahan dan bangunannya.

Lurah Melayu, Aditya Rahkman, dengan kendala lokasi dan gedung yang belum ada, maka dirinya menargetkan pada 2024 bank sampah di Kelurahan Melayu sudah berjalan. Tentunya dengan pemenuhan peralatan, salah satunya mesin pencacah sampah.

"Rencana itu yang akan kami buat kalau

sudah ada bangunannya," ujar Aditya.

Sejauh ini, sudah ada 4 unit bank sampah yang dikelola warga Melayu. Meski diakuiinya belum berjalan secara maksimal, disebabkan kultur dan wilayah masing-masing RT, serta kesadaran warganya.

Setidaknya ada 5 Rukun Tetangga (RT) yang kini memiliki bank sampah. Masing-masing di Kelurahan Induk 1 unit. Sisa ya masing-masing 1 unit di RT 47, RT 38, RT 42 dan RT 44. "Jadi rencana 4 unit bank sampah itu yang akan kami kembangkan. Karena dari situ dalam proses pengelolaan sampah dan penjualannya tepat," tutup Aditya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i



Lurah Mangkurawang, Sufiansyah. (Istimewa)

Sejumlah Program Disiapkan Mangkurawang, Mulai Normalisasi dan Bantuan Perikanan

TENGGARONG - Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar), berencana melakukan normalisasi anak Sungai Mahakam yang mengalir di kawasan Mangkurawang. Menjadi satu dari sejumlah program yang dipersiapkan pada APBD Perubahan (APBD-P) Kukar 2023. Disamping ada pengerjaan perbaikan jalan dan gang.

Lurah Mangkurawang, Sufiansyah, menyebutkan jika normalisasi sungai tidak segera dilakukan, maka akan berdampak bagi kelanjutan para petani di tiga wilayah. Yakni yang berada di Desa Bendang Raya, Rapak Lambur dan Spontan.

"Tiga daerah atas tidak bisa menyawah. Mereka kebanjiran, kalau sungai dinormalisasi otomatis mereka dapat bersawah di atas," ungkap Sufiansyah.

Selain itu, peningkatan produktivitas kelompok petani dan nelayan juga tidak luput dari bantuan yang disalurkan oleh Kelurahan Mangkurawang. Yakni penyaluran bantuan tiga unit perahu ces dan enam unit mesin ketinting. Dimana ada 10 pembudidaya ikan keramba dan 3 kelompok nelayan.

Dirinya berharap pada tahun berikutnya, para nelayan, petani dan kelompok pembudidaya ikan bisa memperoleh bantuan lebih banyak lagi dari Pemkab Kukar. "Kelurahan Mangkurawang berterima kasih atas bantuan yang diberikan setiap tahunnya. Mudah-mudahan bantuan ini lebih besar dan lebih banyak lagi, kami mengharapkan begitu," pungkasnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i



Lurah Melayu, Aditya Rahkman. (Istimewa)

Dua RT di Kelurahan Melayu Bakal Dimekarkan

TENGGARONG - Banyaknya jumlah warga di dalam satu Rukun Tetangga (RT), membuat Kelurahan Melayu berencana memekarkan dua RT. Yakni masing-masing untuk RT 29 yang berada Gang Wakaf Jalan Danau Aji, dan RT 35 yang berada Jalan Gunung Pegat. Dengan alasan jumlah Kepala Keluarga (KK) di 2 RT tersebut tidak lagi memenuhi syarat.

"Itu minimal bisa menjadi dua TPS (Tempat Pemungutan Suara), standarnya itu satu RT 50 KK, tapi sekarang di RT itu sudah sampai 100," ujar Lurah Melayu, Aditya Rahkman.

Namun, potensi pemekaran tersebut sepertinya harus ditinjau ulang olehnya. Lantaran terkendala dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pekab) Kutai Kar-

tanegara (Kukar) berupa program Rp 50 juta per RT. Jika ini direalisasikan, maka RT baru tidak akan terakomodir oleh program dedikasi Kukar Idaman tersebut.

"Takut nantinya ada kecemburuan sosial, belum lagi insentif perangkat RT-nya belum diakomodir," lanjutnya.

Sehingga hal yang memungkinkan untuk dilakukan berupa memecah warga ke dalam RT yang warganya masih sedikit. Yakni membaginya ke RT 35 dan RT 48. Bahkan untuk batas wilayahnya pun sudah klir. Hanya saja kembali kepada warga, ingin memilih pindah ke RT yang mana diantara dua RT tersebut.

"Karena nanti berubah lagi administrasi, KTP, KK, dan surat tanahnya," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i



AMANKAN PEMILU 2024, POLRES BONTANG APEL GELAR PASUKAN OPS MANTAP BRATA 2023-2024

BACA HALAMAN A2

**KONDISI BUKU CERMINKAN
TRANSFER ILMU KE PEMBACA**

KORAN DIGITAL
DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN
KALIMANTAN TIMUR



KONDISI BUKU CERMINKAN
TRANSFER ILMU KE PEMBACA



Kapolres Bontang, AKBP Yusep Dwi Prasetya saat apel Ops Mantap Brata 2023-2024. (ist)

Amankan Pemilu 2024, Polres Bontang Apel Gelar Pasukan Ops Mantap Brata 2023-2024

BONTANG - Dalam rangka pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Polres Bontang beserta jajaran menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024, Selasa (17/10/2023).

Apel gelar pasukan dipusatkan di Mako Polres Bontang dipimpin oleh Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prasetya, Selasa (17/10/2023).

Dalam sambutannya Kapolres Bontang menyampaikan, apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personil, alat serta sarana dan prasarana yang digunakan Polri dalam

rangka mengamankan Pemilu 2024

"Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi yang menjadi titik penentuan masa depan bangsa, yang dalam pengamanannya Polri didukung dengan TNI, instansi terkait dan mitra kamtibmas lainnya," ucap AKBP Yusep mengutip dari Polresbontang.com.

"Operasi ini dilaksanakan selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024," ungkapnya.

Lebih lanjut dalam penjelasannya, Kapolres mengatakan, sebagai dukungan terhadap Operasi Mantap Brata 2023-2024, Polri juga menggelar Operasi

Nusantara Cooling System 2023-2024 untuk mengantisipasi polarisasi akibat berita hoaks, isu sara, propaganda firehouse of falsehood dan black campaign yang dilengkapi dengan Satgas anti money politics serta Satgas pemilu damai.

Terkait tindak pidana pemilu perlu koordinasi dan kolaborasi antar pilar sentra Gakkumdu, agar penanganan pelanggaran serta penyelesaiannya dapat dilakukan secara profesional serta transparan, sehingga mendapatkan Legitimasi dari masyarakat.

Editor: Yusva Alam



Salah satu ruangan rawat inap di RSUD Taman Husada Bontang. (Dwi S)

Ruang Rawat Inap Sudah Penuhi Standar

BONTANG - Ruang rawat inap yang terdapat di RSUD Taman Husada sudah memenuhi nilai standar. Ada beberapa di antaranya, seperti ruang rawat inap intensif, ruang perawatan anak di bawah 18 tahun, serta ruang sesuai dengan kelasnya masing-masing.

Hal ini dijelaskan Tri Ratna Paramita, Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik.

Dikatakannya, ada beberapa ruangan rawat inap yang terdapat di RSUD Bontang, dari ruangan sesuai kelas, Very Important Person (VIP), bahkan ruangan intensif.

Ruangan rawat inap intensif terdiri dari ICU, ICCU, PICU, NICU, serta ruang isolasi. Untuk ruang perawatan biasa meliputi ruang anak usia di bawah 18 tahun, yakni ruang cempaka.

Ruangan perawatan kelas 1 dan ruangan perawatan VIP ada di bagian Seruni. Ruang perawatan kelas 3 dan 2 ada di Bougenvil dan Edelweis, serta ruang perawatan Flamboyan untuk ibu bersalin dan kebidanan kandungan.

Untuk fasilitas ruang rawat inap sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan (PMK), sarana dan prasarana ruangan terbaru sesuai dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), bahwa untuk kelas 3 maksimal ada 6 bed, kelas 2 maksimal 4 bed, serta kelas 1 maksimal 2 bed.

"Kami sudah sesuai dengan kelas masing-masing, dari kelas 3, 2, dan 1," ungkapnya, Senin (16/10/2023).

Kemudian, di setiap ruangan ada ketentuannya, seperti bed elektrik yang dimana pada ruangan insentif bed tersebut harus bisa diputar, serta naik turun. Ada tiga sisi pada bagian kepala, bagian punggung, serta pada bagian kaki. Bed yang wajib berada di ruang Intensive Care Unit (ICU).

Selain itu, ada juga nakas yang disediakan guna penyimpanan barang, pada lemari kecil untuk para pasien. Outlet oksigen yang tersedia, dan sarana lain

seperti AC, dan televisi. Dilengkapi juga dengan saluran telepon di ruang perawatan, untuk mempermudah perawat menghubungi dokter atau yang lainnya.

"Sejauh ini untuk ruang rawat inap sudah sesuai dengan standar kelas B, minimal 200 tempat tidur. Saat ini kami sudah sesuai dengan 200 tempat tidur. Akan tetapi, di kategori yang lain masih ada yang kurang, kalau di PMK yang terbaru ini, bahwa standar yang untuk isolasi 10 persen, kami harus menyiapkan 20 tempat tidur, dan saat ini kami masih kekurangan di situ. Terkait sarana dan prasarana tentu dengan anggaran yang sangat besar," paparnya.

Ratna juga menjelaskan, untuk ruangan perawatan kelas 3 sudah mencapai angka 62 persen, dimana RSUD Bontang sudah memenuhi standar. Dengan standar yang ditetapkan adalah minimal 30 persen dari total tempat tidur, kalau tempat tidur 200 minimal harus memiliki 50 tempat tidur di kelas 3.

Saat ini RSUD sudah memenuhi standar yang ditetapkan.

"Untuk kelas 3 sebenarnya kami sudah memenuhi standar, akan tetapi kelas 3 ini sering sekali penuh. Masih sangat kurang dan banyak pasien yang tidak mendapatkan hak sesuai dengan kelasnya. Tetapi tidak menjadi kendala buat kami, selagi masih ada ruangan yang kosong dan bisa digunakan, akan kami titipkan pasien di ruangan tersebut," bebernya.

Dengan harapan kedepan, bisa mengikuti kelas rawat standar sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) 12 indikator tersebut.

Saat ini RSUD belum bisa memenuhi semuanya, dengan sarana dan prasarana yang baru. Bahkan jika mungkin dengan adanya tambahan gedung baru, dari pemerintah, baik pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah bisa mensupport untuk sarana dan prasarana di RSUD Bontang. (dwi/adv)



Penanganan dokter saat melakukan pemeriksaan pasien di RSUD Bontang. (Dwi S)

Ada 55 Dokter di RSUD, Bakal Tambah Lagi Spesialis

BONTANG - RSUD Taman Husada Bontang saat ini memiliki kurang lebih 55 dokter. Terdiri dari 35 dokter spesialis dan 1 sub spesialis, serta 20 dokter umum.

Tri Ratna Paramita, Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik mengatakan, ke depannya RSUD bakal menambah lagi jumlah dokter, yakni spesialis jantung.

"Sekarang dengan antrian yang sangat panjang, dan dokter jantung di sini meng-cover di pelayanan intervensi, di poli sera ruangan, sehingga kurang maksimal. Agar lebih maksimal, kami akan menambahkan satu dokter lagi untuk spesialis jantung," ucapnya saat diwawancarai Radarbontang.com, Senin (16/10/2023) kemarin.

Selain penambahan dokter spesialis jantung, ada juga dokter yang akan bergabung dengan RSUD Bontang, yakni dokter gigi ortodonti. Dimana dokter gigi ortodonti ini akan membuka pelayanan poli baru.

"Insyaallah di akhir tahun, dokter gigi ortodonti yang akan membuka pelayanan poli baru," paparnya.

Saat ini, juga ada beberapa dokter yang disekolahkan untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis. Yaitu dua dokter umum mengambil bedah plastik dan gigi (penyakit gigi). Serta, ada juga dokter spesialis masih bersekolah untuk mengambil sub spesialis

Konsultan Intensive Care (KIC). Dari Dinas Kesehatan dokter bedah saraf, ortopedi, serta gigi (spesialis gigi tiruan).

"Untuk yang disekolahkan ada PNS disini dari RSUD Bontang, dan dari Dinas Kesehatan. Kalau di RSUD ada dua yang masih sekolah, dua dokter umum, mengambil bedah plastik dan gigi (penyakit gigi). Dokter spesialis juga ada untuk KIC, yang akan berkolaborasi dengan bedah ontopologi penanganan tumor," jelasnya.

Di RSUD Bontang ada beberapa dokter, yakni dari dokter penyakit dalam, dokter kandungan (kebidanan), dokter bedah mulut, konservasi gigi, dokter gigi anak, dokter bedah, sub spesialis bedah otopologi, dokter THT, dokter mata, dokter TH medik, dokter bedah tulang, dokter jiwa, dokter penyakit kulit kelamin, serta anastesi.

Ratna menambahkan, harapannya dokter-dokter yang ada mampu mengembangkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Serta juga dengan sesuai standar sebagai tipe rumah sakit B, rumah sakit sebagai rujukan yang memiliki penanganan yang paling kompleks. Selain itu juga dapat mengembangkan berbagai jenis layanan sub spesialis lainnya. (Dwi/adv)



Beberapa ruang poliklinik di RSUD Taman Husada. (Dwi S)

Terus Bertambah, RSUD Punya 24 Poliklinik

BONTANG – Jumlah poliklinik di RSUD Taman Husada terus bertambah tiap tahun. Penambahan ini guna meningkatkan pelayanan, dan melengkapi kebutuhan kesehatan masyarakat Bontang.

Di tahun 2019 lalu, rumah sakit yang beralamat di Jalan Letjen S. Parman, Nomor 01 ini telah memiliki 21 poliklinik. Di tahun 2022 bertambah tiga poliklinik, yakni Konservasi Gigi, Ortopedi, serta Lepra. Sehingga saat ini total jumlah poliklinik di RSUD berjumlah 24 poliklinik.

Tri Ratna Paramita, Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik mengatakan, penambahan poliklinik berlangsung hingga tahun 2022. Di tahun 2023 ini belum ada penambahan lagi.

"Poliklinik ortopedi yang dimaksud adalah untuk pembedahan tulang. Sedangkan lepra atau pemeriksaan patologi anatomi. Sebenarnya lepra ini bukan klinik, hanya

saja pelayanan dari penegak diagnosa. Untuk memeriksa jaringan tubuh, memeriksa cairan tubuh untuk dilihat di bawah alat mikroskop, melihat sel-selnya. Ada tidaknya sel ganas," ucapnya saat diwawancarai awak media, Senin (16/10/2023).

Walaupun belum ada lagi penambahan poliklinik, namun ada beberapa poliklinik yang berpindah ke gedung B. Adanya perpindahan sebagian poli klinik, agar dapat membuat para pasien menjadi sangat nyaman.

"Seperti dokter gigi, yang awalnya hanya berada pada satu tempat menjadi satu, dan sekarang mempunyai ruangan masing-masing. Dokter spesialis juga sudah satu ruangan tersendiri, bertujuan agar membuat para pasien menjadi nyaman, dan juga dokternya tidak bergantian, jika kemarin bergantian karena keterbatasan tempat dan kursi gigi," tutupnya. (Dwi/adv)



Pelayanan di DPMPTSP. (syakurah/Radarbontang)

Maksimalkan Pelayanan, DPMPTSP Buka Pengurusan Malam

BONTANG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang membuka pelayanan terpadu perizinan malam (Padu Prima) sejak Mei 2022 lalu.

Pelayanan dibuka setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 19.30 sampai 20.30 Wita. Jabatan Fungsional (Jabfung) Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Ekonomi DPMPTSP Bontang, Natalia

Santi Kanan menjelaskan, bahwa pelayanan itu dibuka untuk memudahkan masyarakat yang akan mengurus perizinan.

"Tentu untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat kami buka malam, karena kita tahu tidak semua orang bisa mengurus pagi atau siang," jelasnya.

Pelayanan malam terbilang cuk-

up ramai karena masyarakat yang mengurus tidak diburu oleh pekerjaan. "Kadang ramai kadang sepi, tapi kalau ramai kadang ramai banget," jelasnya.

Santi menambahkan, walaupun tidak selalu ada orang yang melakukan kepengurusan pada malam hari, tapi pihaknya tetap membuka pelayanan tersebut. (sya/adv)



Foto: Ilustrasi usaha. (ist)

Daftar 5 Jenis Usaha Paling Diminati di Bontang

BONTANG - Kota Bontang menjadi tempat pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan banyak perusahaan-perusahaan untuk melakukan investasi. Terdapat juga berbagai jenis usaha yang berdiri di Kota Bontang.

Terdapat 5 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang paling diminati di Kota Bontang, didominasi oleh jenis usaha perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan dan minuman.

"Survei itu kita ambil dari yang diterbitkan melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)," jelas Jabatan Fungsional (Jabfung) Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Ekonomi DPMPSTP Bontang, Natalia Santi Kanan saat ditemui, Selasa (17/10/23).

Santi mengungkapkan, bahwa setiap pelaku usaha di Kota Bontang secara sadar telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), karena mereka sadar dengan

memiliki legalitas maka usaha mereka akan lebih diakui.

"Jadi pelaku usaha ini sadar pentingnya NIB untuk usaha mereka, kalau sudah memiliki NIB maka usaha mereka akan terdaftar di OSS-RBA," ujarnya.

Data ini dihitung sejak 4 Agustus 2021 hingga 16 Oktober 2023. Dengan jumlah usaha terbanyak adalah 638 usaha perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan dan minuman, kemudian yang kedua sebanyak 261 industri kerupuk, kripik, peyek, dan sejenisnya, ketiga sebanyak 259 berupa rumah atau warung makan.

Kemudian yang keempat sebanyak 253 usaha perdagangan besar alat tulis dan gambar, dan yang terakhir sebanyak 235 usaha penyediaan jasa boga periode tertentu.

"Data ini bisa terus bertambah dengan banyaknya warga yang hampir setiap hari mengurus usaha mereka," tutupnya **(sya/adv)**



Kunjungan Ombudsman ke DPMPTSP Bontang. (ist)

DPMPTSP Bontang Dikunjungi Ombudsman RI Provinsi Kaltim

BONTANG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang menerima kunjungan dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (17/10/23).

Ombudsman sendiri bertugas melindungi kepentingan individu dari pelanggaran pelayanan publik oleh aparatur negara. Sehingga dengan itu, kunjungan bertujuan menimbang bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegak hukum yang dilakukan, dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintah merupakan bagian tidak terpisahkan.

Sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga

yang merupakan unsur penting dalam konsep demokrasi. Guna mencegah dan menghapus penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggara dan pemerintah.

"Kami menilai layanan pemerintah, bagaimana mereka melayani publiknya. Hari ini kami datang di kunjungan kedua yakni supervisi untuk mengkonfirmasi penilaian kunjungan pertama untuk menjaga integritas OPD," jelas Ignasius Ryan Gamas, Asisten Pertama.

Selama penilaian semua berjalan dengan baik, mulai dari wawancara hingga ke website. Namun hanya ada satu masalah terkait satu layanan di website DPMPTSP terkait form yang tidak bisa digunakan.

"Tahun lalu memang DPMPTSP ini

zona kuning, tapi kemungkinan tahun ini lebih baik," tambahnya.

Jabatan Fungsional (Jabfung) Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Ekonomi DPMPTSP Bontang, Natalia Santi Kanan menjelaskan, bahwa kunjungan seperti ini memang mendadak, dan setelah dilakukan supervisi oleh provinsi, akan ditindaklanjuti oleh Ombudsman RI.

"Seperti yang dijelaskan bahwa terdapat permasalahan dalam website DPMPTSP, kami nanti akan segera perbaiki," katanya.

Ia menjelaskan, bahwa perbaikan website akan dikoordinasikan langsung ke bagian IT, dan tentu akan dilanjutkan ke dinas terkait agar masyarakat dapat segera mengakses dan menggunakannya. (sya/adv)



Ruangan poliklinik konservasi gigi RSUD Bontang. (Yahya Yabo/Media Kaltim)

Poliklinik Konservasi Gigi, Spesialis Perawatan Saluran Akar hingga Estetika

BONTANG – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Kota Bontang memiliki poli konservasi gigi yang telah ada sejak tahun 2022 lalu. Konservasi gigi ini untuk perawatan saluran akar dan penambalan dengan sinar (restorasi komposit).

Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi, drg Safitri Kusuma Dewi, Sp.KG menjelaskan, poliklinik konservasi gigi seperti melakukan perawatan gigi hingga dapat melakukan perawatan saluran akar (saraf pada gigi) dan estetika pada gigi.

drg Safitri mengatakan, bahwa ia lebih mengutamakan perawatan gigi ketimbang mencabut gigi, sehingga selalu berusaha memperbaiki gigi pasien.

"Konservasi gigi spesialisasi yang lebih ke arah mempertahankan ya, selama dan sebisa mungkin gigi di

dalam rongga mulut dan estetikanya gigi," katanya saat dikonfirmasi.

Ia menambahkan, pelayanan konservasi gigi telah dilakukan sejak Oktober 2022. Setiap harinya, drg Safitri bisa menerima pasien gigi sebanyak 12 orang. Ia sendiri telah menyelesaikan studi konservasi gigi sejak Juli 2022.

"Kami telah ada sejak 2022 lalu. Dalam pelayanan kami bisa melayani hingga 12 pasien setiap hari kerja pelayanan," katanya.

Untuk proses pelayanannya sendiri, ia mengatakan sesuai dengan jadwal pelayanan dengan melakukan observasi pada pasien gigi dan menjadwalkan kontrol pasien.

"Biasanya pasien baru datang dilakukan pemeriksaan awal, radiologi, dan konsultasi. Kemudian dijadwalkan kembali harus kontrol tanggal be-

rapa. Biasanya pasien diminta kontrol dalam waktu seminggu sekali sesuai jadwal," jelasnya.

Safitri menambahkan, keunggulan dari konservasi gigi RSUD Taman Husada Kota Bontang yakni, saat ini telah ditanggung pelayanan oleh BPJS Kesehatan dan juga terintegrasi dengan pelayanan lainnya.

"Kelebihan pelayanan konservasi gigi di RSUD bertanggung BPJS, dan bisa langsung terintegrasi dengan pelayanan lainnya seperti bedah mulut atau dokter gigi anak. Hingga saat ini juga yang sering dialami yakni kendala SDM konservasi gigi yang masih belum banyak," ungkapnya.

Ia mengharapkan ke depannya, RSUD dan Pemkot Bontang lebih memfasilitasi alat konservasi agar jangkauan pelayanan yang dilakukan bisa lebih banyak. (adv/yah)



Pengungkapan Kasus Narkoba di Bontang, Pelaku Ditingkap, Barang Bukti Sabu Disita

BONTANG - Unit II Satresnarkoba Polres Bontang berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial AR yang diduga memiliki, menguasai, menyimpan, dan mengedarkan narkoba jenis sabu.

Penangkapan berlangsung pada Selasa, 17 Oktober 2023, sekitar pukul 13.30 WITA, di tempat tinggalnya Perumahan Bukit Sekatup Damai (BSD), Kota Bontang.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan aktivitas penyalahgunaan narkoba.

Barang bukti yang berhasil disita meliputi 8 bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu seberat 3,25 gram, lembar plastik klip, bong/alat hisap shabu, plastik kresek, korek api gas, dompet warna hitam dan handphone.

Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prastiya melalui Kasat Resnarkoba Iptu Muhammad Yazid mengungkapkan penangkapan berawal dari hasil penyelidikan sebelumnya yang mengindikasikan pelaku AR diduga terlibat dalam peredaran narkoba.

Ketika petugas tiba di lokasi, AR berada di dalam kamar. Setelah dilaku-

kan penggeledahan, sejumlah barang bukti ditemukan di dalam kamar tidurnya.

"Setelah diinterogasi, tersangka mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari seorang temannya yang sebelumnya mengantarkan sabu tersebut ke rumahnya," kata Yazid.

Selanjutnya, tersangka dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bontang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Tersangka AR beserta barang bukti diamankan polisi dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan awal untuk pengembangan perkara lebih lanjut. (MK)



HM SYAFRANUDDIN
Kepala Dinas Perpustakaan
& Kearsipan (DPK) Kaltim

RADAR BONTANG
AKTUAL & TERPERCAYA .COM

KORAN DIGITAL



DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN KALIMANTAN TIMUR

EDISI MINGGU KE 3 - OKTOBER 2023



KONDISI BUKU CERMINKAN TRANSFER ILMU KE PEMBACA



Rahmawati bersama dua orang penerima Penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2023

PEGIAT LITERASI KALTIM TERIMA PENGHARGAAN NUGRA JASA DHARMA PUSTALOKA 2023

SAMARINDA - Salah satu pegiat di kalangan masyarakat Kalimantan Timur, Rachmawati menjadi salah satu penerima Penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2023, yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia (RI) pada malam Gemilang Perpustakaan 2023 di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu, (11/10/2023).

Berita ini diperoleh oleh media kaltim.com dari Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Samarinda Nurhikmah.

"Perpusnas setiap tahun rutin memberikan penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka, untuk pegiat Literasi. Jadi dari kategori masyarakat pegiat literasi Rachmawati lolos menjadi penerima penghargaan tersebut," ungkap Nurhikmah.

Nurhikmah mengungkapkan bahwa Rachmawati selain Pustakawan di Perpustakaan SMP Fastabiqul khairat, dia juga

memiliki taman bacaan di rumah. Dia menyulap teras rumah menjadi taman bacaan untuk masyarakat sekitar rumahnya.

"Jadi Ibu Rachmawati ini memiliki taman bacaan di teras rumahnya," katanya.

Di taman bacaan tersebut, Rachmawati aktif melaksanakan kegiatan literasi dari mengajarkan anak-anak membaca, menulis, membatik dan menari.

"Jadi Rachmawati ini aktif mengajarkan anak-anak disana membaca, menulis dan menari. Selain itu dia juga sering mengadakan pelatihan segala macam di taman bacaan dirumahnya itu. Jadi dari pengalamannya itu beliau terpilih sebagai penerima penghargaan tersebut secara nasional," jelasnya.

Rachmawati menjadi salah satu dari lima orang yang masuk dalam pegiat literasi di lingkungan Masyarakat, atau kategori masyarakat penerima Penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2023.

Diketahui sebanyak 22 indivi-

du/lembaga dari tujuh kategori menerima penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2023 dari Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas). Selain kategori Masyarakat Penerima Penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2023, juga memberikan penghargaan untuk Kategori Pejabat Publik, Kategori Pegiat Literasi, Kategori Media Massa, Kategori Jurnalis, Kategori Pelestari Naskah Kuno, Kategori Lifetime Achievement, Buku (Pustaka) Terbaik, dan kategori lainnya.

Penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka merupakan apresiasi tertinggi dari pemerintah melalui Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) kepada masyarakat baik perorangan, kelompok dan lembaga yang berhasil meningkatkan literasi dan kegemaran membaca secara aktif, efektif, dan inovatif melalui pendayagunaan perpustakaan. **(ADV/Han/DPKD)**

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka DPK Kota Samarinda, Edy Wahyudi. (Hanafi)

TAMAN CANTIK SEGERA HADIR DEPAN DPK SAMARINDA

SAMARINDA - Lahan kosong depan kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Samarinda bakal dibangun taman. Fungsinya, untuk para pembaca agar menjadi pilihan jika ingin membaca di taman atau di dalam kantor layanan perpustakaan.

Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka DPK Kota Samarinda, Edy Wahyudi mengatakan layanan perpustakaan yang berlokasi di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda Kota, akan dibangun taman untuk para pengunjung bisa membaca di luar ruangan.

"Ini sedang dibangun landscape di depan itu untuk para pengunjung perpustakaan," ujar Edy.

Selama ini, ujar Edy, para pen-

gunjung hanya diberikan pilihan untuk membaca di dalam ruangan. Dengan dibangunnya taman ini maka para pengunjung perpustakaan punya dua pilihan.

Selain itu, jika layanan perpustakaan tutup pada sore hari dan hari libur, maka taman ini bisa menarik para pengunjung yang sedang berolahraga di taman atau di sekitar taman tersebut.

"Biasanya setiap sore atau hari libur depan perpustakaan inikan ramai yang berolahraga. Maka tujuannya agar taman ini bisa jadi tempat istirahat sekaligus tempat membaca yang nyaman. Di sana juga nanti akan disediakan kantin pak biar bisa sambil beli minuman atau makan," terangnya.

Untuk bahan bacaan di taman

tersebut rencananya jugakan disediakan anjungan baca digital yang disebut Buncu Baca Etam yang memiliki 600 koleksi buku digital atau e-book yang terdiri dari berbagai macam judul buku.

"Jadi Buncu Baca Etam akan kita sediakan 1 unit agar pengunjung bisa memanfaatkan buku-buku digital yang tersedia," pungkasnya.

Edy berharap dengan dibangunnya taman tersebut masyarakat bisa memanfaatkannya sebagai wadah atau tempat membaca yang baru.

"Semoga dengan adanya taman ini akan lebih banyak lagi pengunjung yang datang kesini" tutupnya. **(ADV/Han/DPKD)**

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Pustakawan Ahli Madya DPKD Kaltim Agus Said dan Pustakawan Ahli Muda DPKD Kaltim Winda Hapiana saat mengecek hasil perbaikan buku yang siap untuk dikembalikan ke layanan perpustakaan Kaltim.

RATUSAN BUKU RUSAK DIPERBAIKI DALAM SETAHUN

SAMARINDA - Buku merupakan teman setia sepanjang hidup. Mereka memberikan pengetahuan, hiburan, dan banyak hal lainnya. Namun, seperti halnya barang lain, buku juga dapat rusak dari waktu ke waktu. Hal ini dapat terjadi akibat berbagai hal, seperti penggunaan yang terlalu sering, dan kerusakan akibat kecelakaan.

Seperti halnya buku-buku yang ada di perpustakaan Kaltim jalan Ir H Juanda Samarinda, milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam satu tahun ada sekitar 600 buku rusak yang berhasil direparasi atau diperbaiki.

Pustakawan Ahli Madya DPKD Kaltim Agus Said mengatakan pihaknya sebelum melakukan perbaikan buku rusak, biasanya melakukan klasifikasi kerusakannya terlebih dahulu. Buku tersebut diambil dari bidang layanan perpustakaan Kaltim.

"Jadi buku di layanan perpustakaan akan

dibawa ke sini (ruangan perbaikan, read) kemudian kita klasifikasi ada rusak ringan, rusak sedang dan rusak parah, kemudian kita bagi dan bedakan cara perbaikannya," jelasnya.

Setelah selesai diperbaiki, buku tersebut dibawa ke ruangan pengolahan, di ruangan pengolahan buku akan daftar kembali dan diinput sebagai buku yang tersedia kembali.

"Jadi buku setelah diperbaiki akan dikembalikan ke layanan untuk dipergunakan kembali," katanya

Ditambahkan Pustakawan Ahli Muda DPKD Kaltim Winda Hapiana mengatakan setiap tahun target 550 buku diperbaiki, dalam perjalanannya sering melebihi target.

"Setiap hari petugas yang konsen dalam perbaikan buku ada 5 pustakawan, dalam satu tahun kita ada target 550 koleksi cuma selalu lebih hingga 600 koleksi buku," pungkasnya. **(ADV)**

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Pustakawan Ahli Madya Agus Said saat mereparasi buku dengan cara dijahit.

BUKU RUSAK, ILMU KEPADA PEMBACA BERHASIL DITRANSFER

SAMARINDA - Kondisi buku yang rusak mungkin sebagian orang akan melihat itu adalah suatu hal kurang nyaman dilihat mata. Tetapi tidak menurut pustakawan - pustakawan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang bertugas melestarikan buku koleksi perpustakaan Kaltim yang berada di Jalan IR H Juanda Samarinda.

Buku yang rusak artinya buku itu telah melaksanakan tugasnya sebagai media transfer ilmu pengetahuan. Dengan kondisi buku yang rusak artinya buku tersebut telah digunakan pembaca atau dibaca sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan oleh pembacanya.

Hal ini disampaikan oleh Pustakawan Ahli Madya Agus Said saat ditemui di sela-sela kesibukannya mereparasi buku - buku perpustakaan dalam kondisi rusak.

"Reparasi buku merupakan

suatu proses yang penting dalam dunia perbukuan, karena memungkinkan buku yang rusak untuk dipulihkan dan digunakan kembali," ujarnya.

Teknik yang digunakan dalam reparasi buku bervariasi tergantung jenis kerusakan yang terjadi pada buku.

"Ada beberapa kategori kerusakan buku, ada yang rusak berat, sedang dan berat," ungkapnya. Ada beberapa kerusakan umum yang terjadi pada buku. Misalnya, seperti halaman yang robek atau rusak, sampul buku yang robek, serta halaman yang terlipat atau lepas dari ikatan buku.

Teknik-teknik reparasi buku yang digunakan meliputi perbaikan halaman yang robek atau rusak dengan merekatkannya kembali, menyemprotkan bahan pengawet pada halaman yang mulai membusuk, dan merekatkan kembali sampul buku yang terlepas dari isi buku dengan cara dijahit.

"Semua teknik ini dilakukan dengan hati-hati dan ketelitian, sehingga hasil akhirnya akan terlihat seolah-olah buku tidak pernah rusak," tambahnya.

Pustakawan Ahli Muda Winda Hapiana menyebutkan buku yang dapat diperbaiki tidak hanya buku-buku langka atau antik, namun juga buku-buku sehari-hari seperti novel atau buku pelajaran.

"Cuma kebetulan ini banyak buku anak-anak yang rusak, buku anak itu seperti buku cerita dan buku belajar anak, dan yang paling sering ini kita perbaiki, karena penulis buku anak itu sangat langka," ujarnya.

Selanjutnya buku yang telah direparasi, buku tersebut akan diinput kembali ke komputer sebagai buku yang tersedia dan dikembalikan ke bagian pelayanan untuk disusun di rak dan siap digunakan kembali. **(Adv)**

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Widya Astuti & Andika Arifin - Pelajar SMK Medika Samarinda

BEGINI ENJOYNYA GEN Z KE PERPUSTAKAAN

SAMARINDA - Di tengah kecanggihan teknologi dan banyaknya koleksi e-book, membaca buku di perpustakaan masih menarik minat Gen Z.

Hal ini pun terlihat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang mayoritas dikunjungi oleh pelajar dan mahasiswa.

Seperti yang dilakukan Widya Astuti dan Andika Arifin, pelajar SMK Medika Samarinda yang tengah berkunjung ke DPKD Kaltim.

Siang itu, Widya dan Arifin berniat untuk mencari bahan bacaan guna mengerjakan tugas sekolah atau sekadar menyisihkan waktu luang untuk membaca buku.

"Kami ditugaskan untuk mengulas buku novel. Nah, novel yang kami pilih adalah novel bertema horor, karena lebih menarik", ucap Widya dan dibenarkan Arifin.

Menurut Widya, saat ini banyak bacaan berupa buku digital, tapi muatan ilmu pengetahuannya kurang lengkap. Oleh sebab itu, Widya dan Arifin ini memilih keperpustakaan

Kaltim untuk mencari buku fisik karena di dalam buku fisik itu lebih lengkap.

"Buku secara fisik itu lebih lengkap dan ada daftar pustaka dan rujukan yang lainnya", ungkapnya.

Selain itu Widya berharap untuk pelajar-pelajar yang lain untuk meramaikan perpustakaan Kaltim, untuk meningkatkan budaya literasi agar tidak tergantung dengan media sosial.

"Penting adanya perpustakaan untuk meningkatkan literasi, karena di internet pun informasi belum tersaring banyak berita hoax," ujar siswi kelas 12 SMK Medika ini

Widya juga mengungkapkan bahwa lebih nyaman membaca buku di perpustakaan. Terlebih lagi fasilitas yang telah disediakan oleh DPKD Kaltim juga lengkap.

"Yuk kesini kita memanfaatkan fasilitas yang ada disini untuk menambah wawasan kita", ajaknya. **(dsy/ADV/dpkd)**

Pewarta : Desy Alvionit

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka DPK Kota Samarinda, Edy Wahyudi. (kiri)

Pustakawan Ahli Madya DPK Kota Samarinda Nurhikmah. (kanan)

Naskah Kuno Terus Disosialisasikan DPK Samarinda

SAMARINDA - Demi menyelamatkan naskah kuno, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Samarinda akan menggelar sosialisasi kepada masyarakat.

Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka DPK Kota Samarinda, Edy Wahyudi mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi tentang naskah kuno agar naskah-naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat bisa dibantu untuk dilestarikan.

"Sementara ini kita akan sosialisasi soal naskah kuno, karena kita belum mengkaji ini. Jadi langkah awal kita akan sosialisasikan, setelah terkumpul informasinya kita akan kunjungi," ujarnya kepada MediaKaltim.com Selasa (10/10).

Diketahui naskah kuno adalah naskah yang bertuliskan isi sejarah, ramuan tradisional, agama dan lainnya yang berumur di atas 50 tahun dan ditulis menggunakan tangan.

Edy Wahyudi mengatakan naskah kuno dengan usianya yang sangat berumur tentunya sangat rentan rusak. Untuk itu, DPK Kota Samarinda mengimbau masyarakat yang memiliki naskah kuno untuk menyerahkannya kepada DPK Kota Samarinda sebagai upaya melestarikan naskah kuno yang dimiliki masyarakat.

"Naskah kuno yang dimiliki masyarakat boleh ditiptkan ke DPK Kota Samarinda untuk dilestarikan. Kami akan alih me-

diakan dan kita akan berikan sertifikat kepemilikan naskahnya. Tapi kalau masyarakat tidak berkenan ditiptkan, maka kami mengajarkan cara merawatnya, karena menjaga naskah kuno itu tidak sembarangan," ungkapnya.

Sementara itu Pustakawan Ahli Madya DPK Kota Samarinda Nurhikmah, menyebutkan selama ini belum ada penggalan informasi terhadap naskah kuno yang ada di Samarinda. Oleh sebab itu, pihak DPK Kota Samarinda akan menggali informasi tentang keberadaan naskah kuno yang dilaporkan masyarakat ke DPK Kota Samarinda.

"Nah kita dapat informasi ada Alquran kuno di Masjid Shiratal Mustaqiem, Samarinda Seberang dan naskah yang ditulis di atas daun lontar dimiliki masyarakat. Kami belum punya tim ahli untuk meneliti berapa umur dari Alquran kuno tersebut. Oleh sebab itu m, kita akan kerjasama dengan Perpustakaan untuk melihat apakah ini benar kategori naskah kuno atau bukan," ujarnya.

Naskah kuno ini sangat penting diawetkan dan dilestarikan agar bisa dipelajari oleh generasi saat ini dan generasi mendatang.

"Tentunya ini akan dijadikan sejarah, agar generasi akan datang bisa tau bahwa sejarah ditempat kita ada naskah kuno nya," tutupnya. **(ADV)**

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



TINJAU PEMBANGUNAN DERMAGA PULAU DERAWAN, HARAP NOVEMBER RAMPUNG DIKERJAKAN

A



**DORONG PEMBENTUKAN SATGAS
UNTUK CEGAH KEKERASAN DI SEKOLAH**



Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga saat meninjau pembangunan Dermaga Pulau Derawan.

TINJAU PEMBANGUNAN DERMAGA PULAU DERAWAN, HARAP NOVEMBER RAMPUNG DIKERJAKAN

TANJUNG REDEB - Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga melakukan peninjauan pembangunan Dermaga Wisata Pulau Derawan di Kampung Pulau Derawan, Selasa (16/10/2023).

Dari data yang dihimpun, diketahui pembangunan dermaga tersebut dimulai sejak tahun 2022 lalu. Untuk pengerjaannya sendiri melalui dua tahapan.

"Awal itu pada tahun 2022, kemudian di tahun 2023 ada lagi dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau," katanya di sela-sela meninjau pembangunan dermaga.

Untuk anggaran pembangunan tersebut, jelas Saga, pada tahap pertama, dikucurkan sebesar Rp 11 miliar." Sedangkan ditahap kedua dianggarkan oleh Pemda sebesar itu sebesar Rp 8 miliar," ungkapnya.

Terkait progres pembangunan, dirinya mengaku, ditargetkan pada akhir November rampung dikerjakan. Hanya saja, jika pengerjaan terjadi keterlambatan, pihaknya telah mengantisipasi melalui adendum yang mengestima-

sikan pada pertengahan Desember nanti.

"Progres pembangunan dermaga sudah mencapai 60 persen. Walaupun ada keterlambatan rampung nantinya, sudah ada adendum yang mengestimasi sampai tengah bulan Desember nantinya, yang jelas tahun ini harus sudah rampung," jelasnya.

Selain itu, dirinya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mengakomodir pihak kontraktor.

Sebab, dilihat dari kondisinya sendiri, akan memasuki akhir tahun, dikhawatirkan membludaknya wisatawan yang berkunjung nantinya.

Untuk itu, Saga berupaya, mendorong percepatan penyelesaian dermaga guna membangun akses wisata satu pintu ke Pulau Derawan.

"Nantinya dermaga tersebut akan di jadikan dermaga akses satu pintu tempat datang dan perginya wisatawan yang berkunjung ke pulau derawan ini, dan tentunya PAD kita juga akan terbantu melalui akses penggunaan dermaga ini juga," pungkasnya. (adv/set)



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiyah.

DORONG PEMBENTUKAN SATGAS UNTUK CEGAH KEKERASAN DI SEKOLAH

TANJUNG REDEB - Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiyah menyoroti terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah yang menimpa seorang siswa beberapa waktu lalu.

Ia mengungkapkan, kekerasan di lingkungan sekolah seharusnya tidak terjadi, pasalnya sekolah harus menjadi tempat yang paling aman dari tindak kekerasan. Namun kenyataannya, beberapa kasus kekerasan justru terjadi di lingkungan sekolah.

Menurut Syarifatul, pihak sekolah harus membentuk satgas khusus untuk mencegah terjadinya perundungan di sekolah melalui Peraturan Menteri Pen-

didikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan.

"Kekerasan itu sangat berbahaya dan penting bagi kita untuk membuat sistem pengaduan yang dapat melindungi korban dan saksi serta penanganan yang melibatkan psikolog di dalamnya," ujarnya.

Politikus Golkar ini memaparkan, faktor terjadinya kekerasan di sekolah bisa saja karena pelaku juga diasuh dengan kekerasan sehingga berpotensi melakukan hal serupa kepada teman sebayanya.

"Sehingga orangtua sebaiknya mendidik anak-anaknya untuk berani berbicara jika mengalami kekerasan dari teman sebaya di sekolahnya," tegasnya.

Syarifatul meminta pihak sekolah untuk menaggapi kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah dengan tegas serta tidak mengabaikan laporan yang diajukan setiap korban perundungan.

"Sekolah harus terus memberikan sosialisasi dan mengingatkan kepada para siswa maupun orangtua siswa dampak yang terjadi akibat perundungan dan kekerasan ini," tandasnya. (adv/set)



Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Ratna Kalalembang.

HARAP PARIWISATA MAMPU IMBANGI PERTAMBANGAN

TANJUNG REDEB - Kabupaten Berau memiliki sektor pariwisata sebagai sektor unggulan. Karena itu, kehadirannya diharapkan mampu mengimbangi pertambangan batubara.

Diketahui, sektor pertambangan batubara masih menjadi primadona sebagai penyumbang pendapat asli daerah (PAD). Persentasenya mencapai 64 persen. Karena itu, perlu maksimalisasi sektor lain untuk menyaingi sektor pertambangan, terutama sektor pariwisata.

Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Ratna Kalalembang menuturkan, pariwisata berpotensi menjadi sumber pendapatan pengganti pertambangan. Terlebih, Bumi Batiwakkal memiliki banyak destinasi wisata yang dapat dikelola dengan baik untuk mendatangkan devisa bagi daerah.

"Kita punya banyak destinasi wisata. Kalau semuanya itu dikelola dengan baik, bisa mengimbangi bahkan melampaui sektor pertambangan itu," jelasnya.

Selain itu, lanjut Ratna, Berau akan menjadi salah satu kota penyanggah ibukota Nusantara (IKN). Sebagai kota penyanggah yang kaya

akan destinasi wisatanya, Berau akan menjadi daerah yang pasti akan selalu dikunjungi wisatawan baik domestik atau mancanegara.

"Berau dianugerahi banyak destinasi wisata yang indah. Masuknya IKN dan menjadi salah satu kota penyanggah, harusnya menjadi momen kebangkitan pariwisata," terangnya.

Untuk mencapai tujuan itu, Ratna meminta OPD terkait khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau untuk mulai memikirkan solusi yang bisa ditempuh untuk mengelola sektor pariwisata secara baik dan optimal.

Ditambahkannya, inovasi dan kreativitas untuk membenahi sektor itu juga harus ada. Sebab tanpa ada inovasi dan kreativitas, anggaran yang minim untuk pariwisata akan selalu menjadi alasan pembangunan pariwisata tidak berjalan maksimal.

"Inovasi dan kreativitas membenahi pariwisata diperlukan. Seringkali dinas terkait keluhkan minimnya anggaran. Lalu kurang membangun. Kemudian minta pusat. Pusat juga akan bantu kalau ada inovasi itu," tandasnya. (adv/set)



Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya.

PEMERINTAH HARUS TAMBAH PROGRAM KETAHANAN PANGAN

TANJUNG REDEB - Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya mendorong pemerintah menambah program yang berfokus pada ketahanan pangan.

"Program-program yang feedbacknya langsung ke masyarakat, berkaitan dengan fokusnya ketahanan pangan, dengan membedah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 itu masih sangat kurang," jelasnya.

Dijelaskannya, keberpihakan pemerintah untuk program ketahanan pangan masih kurang. Padahal, anggaran saat ini cukup besar, seharusnya porsi untuk OPD terkait bisa lebih besar. Agar program yang dibuat bisa lebih banyak.

"Supaya bisa menjalankan program ketahanan pangan dengan maksimal. Misal, mem-

berikan bantuan langsung ke petani berupa pupuk, benih dan lainnya, agar bisa langsung dirasakan manfaatnya," tegasnya.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), dari 7 kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Berau memiliki ketahanan pangan tertinggi. Bapanas mengukur indeks ketahanan pangan di kabupaten-kabupaten Indonesia berdasarkan sembilan indikator utama.

Berbagai indikator itu kemudian diolah menjadi skor berskala 0-100. Semakin tinggi skornya, ketahanan pangan suatu daerah diasumsikan semakin baik. Dengan metode tersebut, Kabupaten Berau meraih skor 86,16 pada 2021, paling tinggi di antara kabupaten-kabupaten tetangganya. (adv/set)



Anggota
Komisi III
DPRD Berau,
Subroto.

RESPONS POSITIF PROGRES PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PESISIR SELATAN BERAU

TANJUNG REDEB - Pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pesisir selatan saat ini mencapai sekitar 80 persen. Bahkan ditargetkan akhir bulan Desember yang akan datang pembangunan infrastruktur jalan ini ditargetkan bakal rampung.

Hal tersebut direspons positif Anggota Komisi III DPRD Berau, Subroto. Dinilainya kabar itu membawa angin segar bagi masyarakat luas, khususnya warga pesisir selatan.

"Sebab dengan adanya peningkatan infrastruktur jalan, semua pergerakan ekonomi dapat berjalan lebih lancar. Karena transportasi darat khususnya, didukung dengan infrastruktur jalan yang sangat mendukung," ujarnya kepada media ini.

Mengingat, sambung Subroto, sejauh ini hasil pertanian maupun hasil laut diangkut dengan transportasi darat. "Termasuk kebutuhan bahan pokok warga dari Kota Tanjung Redeb ke daerah pesisir, hampir semua diangkut menggunakan transportasi darat. Kemudahan inilah yang nantinya akan meningkatkan perekonomian warga pesisir selatan," paparnya.

Seiring dengan pembangunan peningkatan infrastruktur jalan tersebut, dirinya juga mengusulkan kepada Pemkab Berau agar melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan Kecamatan Talisayan.

"Sebab sekitar 10 tahun pengaspalan di Kecamatan Talisayan belum dilakukan. Dalam Musrenbang beberapa waktu lalu sudah saya usulkan kepada Bupati dan Wakil Bupati, termasuk mas-

yarakat menyampaikannya, agar segera dilakukan pengaspalan," ungkapnya.

Dijelaskan pula, bahwa jalan menuju Buang Naas sudah lama membutuhkan perhatian, termasuk jalan menuju kampung yang ada di sekitar Talisayan.

"Alhamdulillah, usulan kami mendapat respon dari bupati dan wakil bupati, bahwa di tahun 2024 mendatang akan dilakukan pengaspalan di Talisayan," imbuhnya.

Selain itu Subroto juga mengusulkan jalan dari Tabalar Muara menuju Kampung Berantai, agar segera dilakukan pengaspalan.

"Karena kalau lewat dalam (Tabalar Muara) dengan kondisi jalan seperti sekarang bisa menghemat waktu sekitar 30 menit, dibandingkan lewat jalur utama. Nah, apa lagi nanti kalau sudah diaspal, tentu jauh lebih menghemat waktu, mungkin bisa 15 menit selisihnya," terangnya.

Untuk itu dirinya berharap tahun 2024 mendatang apa yang menjadi usulan masyarakat tersebut dapat direalisasikan, mengingat APBD Berau sangat besar, sehingga mudah untuk diakomodir.

"Pengaspalan dalam Kecamatan Talisayan dan Tabalar Muara ini dapat menunjang kemudahan akses wisatawan menuju daerah wisata yang ada di pesisir selatan. Sehingga jumlah wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Berau akan terus bertambah," pungkasnya. (adv/set)



BALIKPAPAN FEST 2023: MERAYAKAN KERAGAMAN BUDAYA DUNIA DI NUSANTARA



**GELAR OPS MANTAB BRATA
MAHAKAM 2023,
INI ATENSI KAPOLDA KALTIM**



Kadisporapar Kota Balikpapan, Cokorda Ratih Kusuma (tengah) saat menjelaskan kegiatan Balikpapan Fest 2023.

BALIKPAPAN FEST 2023: MERAYAKAN KERAGAMAN BUDAYA DUNIA DI NUSANTARA

BALIKPAPAN - Balikpapan Fest 2023, acara tahunan digelar Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan, di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome mulai 20 hingga 22 Oktober 2023.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan, Cokorda Ratih Kusuma mengatakan, Balikpapan Fest 2023 melibatkan para pelaku industri kreatif lokal dan telah menjadi salah satu agenda nasional yang menarik perhatian dari Kementerian Pariwisata RI, serta menjadi bagian dari kalender program Karisma Event Nusantara (KEN) 2023.

"Balikpapan Fest 2023 yang merupakan edisi keempat penyelenggaraannya, mengambil tema 'World Cultural Diversity in Nusantara,' untuk menyambut kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dan juga menyiapkan Balikpapan sebagai kota penyangga IKN," ujarnya, Selasa (17/10/2023).

Lebih lanjut, Ratih men-

jelaskan, Balikpapan Fest 2023 akan menyuguhkan beragam kekayaan budaya negeri Indonesia melalui pertunjukan-pertunjukan seni dan budaya yang mengesankan. "Pada hari pertama atau Opening Event akan ada penampilan budaya berupa solo dance, Color Guard Mathilda, dan Tari Kolosal Nusantara medley Mancanegara oleh Lely Monsterga," jelasnya.

Fashion Festival akan menjadi sajian unggulan pada hari kedua Balikpapan Fest 2023 dengan menampilkan peragaan fashion batik, kostum tradisional, dan kostum mancanegara karya 11 desainer dengan 55 karya busana masing-masing.

"Adapun 11 desainer yang terlibat yaitu Ellis Gown, Sherlita Wahjono, Harum, Lita One, Jesthink, Javabor, Primas G Prihanta x Azalea, Dekranasda by Griya Godong, Dekranasda by Iwatik, Dekranasda by Kelubut, dan Harukareh by SMKN 4 Balikpapan," tambah Ratih.

Selanjutnya, puncak acara

Balikpapan Fest 2023 diramainkan dengan Extraordinary Night yang akan diisi oleh talent lokal Band Teras Kaca dan DJ Aditrea, serta Tari Kreasi Nusantara Modern oleh Lely Monsterga. Penampilan spesial dari bintang tamu Ziva Magnolya (juara Indonesian Idol season 10) akan menjadi line up utama menjelang penutupan Balikpapan Fest 2023.

"Tidak hanya itu, selama penyelenggaraan Balikpapan Fest 2023, para pengunjung juga dapat menikmati Festival Kuliner dari sekitar 70 tenant yang menyajikan hidangan khas dan mengugah selera," ujar Ratih lagi.

Dengan semangat untuk memperkuat dan merayakan keanekaragaman budaya, Balikpapan Fest 2023 juga mengajak semua pihak untuk turut serta membangun momentum positif dengan mengangkat dan mempromosikan warisan budaya yang ada di Kalimantan khususnya kota Balikpapan. (Bom)

Penulis: Aprianto

Editor: Agus Susanto



Kejati Kaltim, bersama Plh. Kadisdikbud Kaltim, berfoto bersama salah satu perwakilan Duta Pelajar Sadar Hukum Kaltim 2023.

DUTA PELAJAR SADAR HUKUM KALTIM 2023, AGEN PERUBAHAN DARI GENERASI MILENIAL

BALIKPAPAN - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim menggelar pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum Provinsi Kaltim tahun 2023 di Kota Balikpapan mulai 17-20 Oktober 2023.

Kegiatan dibuka Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, Hari Setiyono, didampingi Plh. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Robiana Hastawulan.

Kepala Kejati Kaltim, Hari Setiyono, mengatakan bahwa kegiatan ini akan menjadi contoh nasional dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar.

"Duta pelajar sadar hukum di provinsi Kaltim ini merupakan pionir yang sudah keempat kalinya kami selenggarakan. Harapan kami, ini bisa menjadi contoh nasional bagi seluruh Indonesia dalam mengantisipasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelajar," ujarnya pada Kamis (17/10/2023).

Hari menjelaskan bahwa pemilihan duta pelajar sadar hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada generasi milenial, khususnya pelajar. Hal ini penting karena angka pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelajar di Indonesia masih tergolong tinggi.

"Di daerah lain, kita sering mendengar pelajar yang terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum. Namun, di Kaltim, kita be-

lum pernah mendengar hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelajar di Kaltim memiliki tingkat pemahaman hukum yang baik," jelasnya.

Para duta pelajar sadar hukum yang terpilih akan mendapatkan pelatihan khusus tentang hukum. Mereka juga akan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

"Kami berharap, para duta pelajar sadar hukum ini dapat menjadi agen perubahan di lingkungan mereka. Mereka dapat membagikan pengetahuan hukum kepada teman-teman mereka," tambah Hari.

Sementara itu, Robiana Hastawulan, mengaku bahwa kegiatan ini sangat berdampak positif bagi para pelajar. Pasalnya, hukum harus dikenalkan sejak dini kepada para pelajar.

"Yang perlu ditekankan adalah bahwa ketika mereka memperoleh pemahaman tentang hukum, secara otomatis mereka akan memperkuat keamanan dalam diri dan lingkungannya. Selain itu, mereka dapat mengedukasi teman-teman mereka," ucapnya.

Seperti yang diketahui, sebanyak 10 Kabupaten/Kota di Kaltim mengirimkan perwakilan dari pelajar SAM/SMK/MA/SLB (Tuna Daksa) untuk mengikuti pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum Kaltim 2023. (Bom)

Penulis: Aprianto

Editor: Agus Susanto



Kapolda Kaltim didampingi Pangdam VI/MLw dan Stakeholder lainnya memeriksa pasukan Ops Mantab Brata Mahakam 2023.

GELAR OPS MANTAB BRATA MAHAKAM 2023, INI ATENSI KAPOLDA KALTIM

BALIKPAPAN - Kapolda Kaltim, Iren Pol Imam Sugianto memimpin langsung apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Mantab Brata Mahakam 2023 di halaman SPN Brimob Polda Kaltim, Selasa (17/10/2023). Operasi ini merupakan langkah Polri dalam melaksanakan pengamanan jalannya tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang.

Kapolda Kaltim mengatakan, Operasi Mantab Brata Mahakam 2023 ini juga akan di bagi dalam dua tahap, yakni di tahun 2023 dan tahun 2024 mendatang. Hal ini dilakukan agar seluruh tahapan pemilu bisa berjalan dengan aman, lancar dan kondusif.

"Yang pertama di tahun 2023 ini kita laksanakan selama 74 hari. Nanti tahap kedua di tahun 2024 selama 148 hari," ujarnya.

Lebih lanjut Kapolda Kaltim menjelaskan, dalam pelaksanaannya TNI-Polri dan stakeholder terkait akan mengerahkan personel sebanyak 5.388

orang. Dimana seluruh personel ini akan di fokuskan pada tahapan hingga kedatangan logistik pemilu tahun 2024 mendatang.

"Yang menjadi atensi kita saat kedatangan logistik pemilu itu. Maka kantor KPU sudah harus dijaga dan diamankan," jelasnya.

Imam Sugianto menambahkan, Kaltim merupakan salah satu wilayah yang berpotensi terjadinya kerawanan pelanggaran pemilu. Namun, hal yang paling menjadi perhatiannya adalah pengiriman surat suara.

"Yang paling menjadi perhatian itu adalah pengiriman surat suara. Baik dari KPU ke TPS ataupun sebaliknya. Ini yang paling rawan," tambahnya.

Namun Kapolda Kaltim memastikan, hingga kini seluruh tahapan pemilu tahun 2024 masih aman dan kondusif. "Mudah-mudahan kondisi ini sampai pemilu selesai," tutupnya. (Bom)

Penulis: Aprianto

Editor:



SEKTOR MIGAS DI PASER JADI TARGET PEMKAB UNTUK TINGKATKAN PENGHASILAN

**PEMKAB PASER ALOKASIKAN
RP 1,6 TRILIUN UNTUK BELANJA
PEGAWAI DI TAHUN 2024**





: Asisten Ekbang Setkab Paser, Adi Maulana

SEKTOR MIGAS DI PASER JADI TARGET PEMKAB UNTUK TINGKATKAN PENGHASILAN

PASER - Hilirisasi minyak dan gas bumi (Migas) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya di Kabupaten Paser, menjadi perhatian Pemkab Paser sebagai upaya untuk mendorong perekonomian daerah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setkab) Paser, Adi Maulana, setelah mendampingi Bupati Paser, Fahmi Fadli, dalam pertemuan dengan SKK Migas Kantor Perwakilan Kalimantan-Sulawesi (Kalsul) beberapa waktu lalu.

Adi menyatakan bahwa sinergi antara SKK Migas dan Pemerintah Daerah yang memiliki potensi Migas, seperti Pemkab Paser, sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk menentukan peran pemerintah dalam mendukung penca-

ian dan target sektor Migas.

"Jadi, kami diundang kemarin untuk diberitahu tentang peran pemerintah daerah, peran PPRL sebagai KKKS, dan peran SKK Migas agar semua dapat beroperasi sesuai dengan tugas masing-masing," ujar Adi.

Kabupaten Paser saat ini sedang melakukan produksi minyak oleh Pasir Petroleum Resources Limited (PPRL) yang berada di bawah pengawasan SKK Migas. Lokasi produksi ini terletak di Desa Pasir Belengkong, Kecamatan Paser Belengkong.

Tujuan akhir dari kegiatan eksplorasi Migas ini adalah memberikan hasil yang terbaik dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah secara keseluruhan. Pemkab Paser juga diminta untuk memperhatikan kebijakan-kebijakan Pemerintah

Pusat terkait pengelolaan Migas.

"Dengan demikian, peluang-peluang bagi daerah untuk berpartisipasi dalam pengembangan industri minyak dan mendukung pembangunan akan muncul," tambahnya.

Sebagai informasi, PPRL memulai pengeboran pada tahun 2009. Namun, baru pada tahun 2014 mereka berhasil menemukan sumber minyak di Sumur Kinanti 1. Sementara Sumur Kinanti 2 belum menghasilkan minyak. Eksplorasi yang dimulai sejak tahun 2017 akhirnya menghasilkan produksi minyak pada Januari 2022 di Sumur Kinanti 1. Saat ini, PPRL mampu memproduksi 300 barel minyak mentah per hari. Penggalan di Sumur Kinanti 3 diharapkan dapat membantu meningkatkan produksi sejak Oktober 2022. (bs)



Bupati Paser, Fahmi Fadli

PEMKAB PASER ALOKASIKAN RP 1,6 TRILIUN UNTUK BELANJA PEGAWAI DI TAHUN 2024

PASER - Lebih dari setengah pendapatan daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser tahun 2024 akan dialokasikan untuk belanja operasional Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser.

Ini tertuang dalam Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Paser tahun 2024 yang disampaikan oleh Bupati Paser, Fahmi Fadli, dalam rapat paripurna yang digelar Senin (16/10/2023).

Dalam Raperda APBD Kabupaten Paser tahun 2024, alokasi belanja operasional diproyeksikan mencapai Rp 2,5 triliun, sementara pendapatan direncanakan mencapai Rp 3,9 triliun.

Bupati Fahmi Fadli menjelaskan, "Sebanyak Rp 1,6 triliun dari total belanja operasional akan dialokasikan untuk belanja pegawai."

Selain itu, terdapat alokasi untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp 935 miliar, serta belanja hibah sebesar Rp 49 miliar. Belanja modal juga direncanakan mencapai Rp 1,4 triliun, dengan sebagian besar dialokasikan untuk investasi dalam pengembangan jalan, jaringan, dan irigasi sekitar Rp 1,07 triliun.

Adapun komposisi belanja modal lainnya adalah modal tanah sebesar Rp 24,2 miliar, modal peralatan dan mesin sebesar Rp 121,9 miliar, modal gedung dan bangunan sebesar Rp 254,6 miliar, modal aset sebesar Rp 90 juta, serta modal aset tetap

senilai Rp 34 juta.

Selain itu, belanja tak terduga diproyeksikan mencapai Rp 10 miliar, sedangkan belanja transfer akan mencapai Rp 367,6 miliar yang terbagi menjadi belanja bagi hasil sebesar Rp 4,8 miliar dan belanja bantuan keuangan sebesar Rp 388,7 miliar. Untuk pembiayaan, diperkirakan akan menggunakan dana sebesar Rp 585 miliar dari Sisa Lebih Anggaran Pembiayaan (Silpa) tahun sebelumnya.

"Pembiayaan ini merupakan proyeksi dari Sisa Lebih Anggaran Pembiayaan (Silpa) tahun sebelumnya yang diperkirakan mencapai Rp 600 miliar. Selain itu, akan ada penyertaan modal daerah sebesar Rp 15 miliar," pungkas Fahmi. **(bs)**

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

AKSI RAYA

.COM

EDISI RABU
18 OKT 2023



**PENGUSAHA MUDA ARIE WIBOWO:
DARI DUNIA OTOMOTIF, ORGANISASI,
HINGGA BERKIPRAH DI POLITIK**

**MUDA
BERAHLAK
AMANAH
DINAMIS**

**ARI
WIBOWO**

CALEG DPRD KOTA SAMARINDA
DAPIL 5 SAMARINDA UTARA - SUNGAI PINANG

ARI
WIBOWO

PENGUSAHA MUDA ARIE WIBOWO: DARI DUNIA OTOMOTIF, ORGANISASI, HINGGA BERKIPRAH DI POLITIK

SAMARINDA – Posternya mu-lai banyak menghiasi sudut-sudut Kota Tepian. Di kalangan para pengusaha muda, sosoknya sudah tidak asing. Namun, mungkin banyak masyarakat yang belum mengenalnya. Adalah Arie Wibowo.

Pria Kelahiran Samarinda, 09 Maret 1981, politisi Partai Golkar ini menjadi salah satu calon wakil rakyat DPRD Kota Samarinda daerah pemilihan 5, Sungai Pinang, dan Samarinda Utara.

Putra dari (Alm.) Soemardi dan Aisyah ini, bukan sosok baru dalam politik dan organisasi. Pendiri Tiger Club Samarinda 2005 silam, mulai menapaki dunia organisasi kala tergabung di Pemuda Panca Marga Samarinda 2007 lalu. Dari situ, ketertarikannya akan berorganisasi, semakin tinggi.

“Saya suka berinteraksi dengan orang banyak. Mungkin karena awal karir saya yang tak lepas dari dunia marketing bisnis otomotif,” katanya.

Jangan heran kalau Anda bakal cepat akrab dengan sosok Arie. Ia paham bagaimana membuat suasana obrolan menjadi lebih hidup, dan memahami keperluan lawan bicara. Tak heran ia punya jaringan hingga ke beberapa daerah di luar Kalimantan Timur, termasuk Jakarta. “Ilmu marketing sales itu ternyata sangat berguna untuk perjalanan karir dan usaha saya,” ujarnya.

Sejak 2002 hingga kini, dunia otomotif menjadi salah satu bidang usaha yang diseriusinya. Ia pernah menjajal kerasnya dunia sales otomotif, menjadi supervisi tim marketing, Fleet manager, Head Corporate communication, area manager hingga akhirnya memulai badan usaha PT. Borneo Bintang Perkasa yang juga masih berkaitan dengan otomotif.

“Puluhan tahun ada di wilayah itu (otomotif) menjadikan saya

paham bagaimana alur dan cara pengembangan bisnisnya,” katanya lagi.

Kerap bertemu banyak orang, termasuk pejabat, politisi, dan pengusaha, membuat Suami dari Julia Merisya ini mulai tertarik merambah ranah politik.

“Awalnya memang belum tertarik. Kedekatan dengan beberapa politisi dan pejabat itu, niat awalnya selain menjalin silaturahmi, juga untuk memperluas celah dan peluang usaha,” terangnya.

Sejak dipercaya menjadi Sekretaris Laskar Merah Putih Kota Samarinda 2015 lalu, menjadi titik balik ketertarikannya pada organisasi dan politik. Setahun setelahnya ia mulai “berkenalan” dengan Partai Golongan Karya (Golkar). Ia dipercaya menjadi bagian tim pemenangan Dapil IV Golkar sejak 2016 hingga 2021. Di tahun 2021 itu juga, Arie menjejak langkah besar saat ia dipercaya menjadi Ketua AMPI Samarinda. Sayap Golkar itu, dibuatnya lebih aktif. Tanpa banyak cakap, AMPI lebih menggeliat dengan sederet aktifitas reguler yang ia inisiasi. Baik itu untuk kelancaran organisasi langsung, kolaborasi untuk mendapatkan anggaran operasional, hingga program peduli sesama. Usahnya tak sia-sia. Dibawah koordinasinya, AMPI lebih bergairah dan bersemangat.

Dari situ, ayah dari 4 anak perempuan ini, menyadari untuk berbuat lebih banyak, harus berada pada ‘circle’ yang tepat.

“Pengabdian, pengaruh, dan tindakan yang lebih besar di dunia poli-

tik, salah satunya dengan menjadi legislator yang membentuk, menjalankan, dan mengawasi kebijakan peraturan yang memberi dampak besar pada masyarakat,” papar warga Jl. Ade Irma Suryani, Sungai Pinang Dalam ini.

Perannya yang penting pada AMPI Samarinda, membuatnya



Lanjutan Utama

naik level. Ia dipercaya menjadi Sekretaris AMPI Kaltim dalam pengurus baru 2023 ini.

Sebagai sosok yang matang di 'lapangan', membuat Arie memahami apa saja kekurangan dan kebutuhan pembangunan di wilayahnya. Utamanya wilayah Kecamatan Sungai Pinang dan Samarinda Utara.

"Pembenahan dan pembangunan wilayah bukan sekadar tanggung jawab pemerintah. Di dalamnya ada peran penting wakil rakyat yang secara teratur dekat dan menyerap masukan warga. Ada proses anggaran dan pengawasan yang menjadi kunci dari proses pembangunan itu," jelasnya. Kemudian tambahnya, Disitulah peran dirinya yang tertantang untuk ambil bagian.

"Apalagi, Sungai Pinang dan Samarinda Utara adalah beran-

da Kota Samarinda yang punya banyak potensi dan masih punya banyak PR pembenahan," tuturnya.

Perjuangan Arie sudah on the track. Calon Legislatif Dapil 5 Sungai Kunjang dan Samarinda Utara ini, ditetapkan dengan nomor urut 4. Sama dengan nomor urut partai Golkar yang juga 4.

"Alhamdulillah kesamaan nomor itu sangat membantu dalam membangun brand personal caleg," akunya. Meski Pemilu serentak 2024 menyisakan beberapa bulan saja, persiapan Arie sudah dilakukan jauh hari sebelumnya. Bukan hal yang mudah memang. Mengingat, persaingan di wilayah dapil 5 cukup berat. Arie sadar sebagai 'caleg baru' ia harus melakukan perjuangan dan penyesuaian yang besar. Apalagi, ia tak mau hanya terlihat dan

dikenal di masa kampanye saja. Begitu terpilih, lantas 'menghilang'. Seperti yang ia terapkan pada beberapa badan usahanya, ia tak pernah lupa memberi porsi yang sesuai pada mereka yang berjasa dan bersamanya dalam berjuang dalam perjalanan karirnya.

Menurutnya, kini warga sudah pintar, sejatinya yang mereka inginkan adalah wakil rakyat yang kons

isten mengemban amanah dan memerhatikan kebutuhan dan pembangunan wilayah sekitar.

"Pada akhirnya kembali juga pada masyarakat untuk bisa menilai caleg mana yang punya potensi benar-benar memberi dampak positif dan betul-betul mereka kenali dan pahami untuk selanjutnya dipilih dan dipercaya menjadi wakil mereka," tutupnya. (rls)

BIODATA:

- Nama: Arie Wibowo
- Tempat Tanggal Lahir: Samarinda, 09 Maret 1981
- Agama: Islam
- Pekerjaan: Swasta
- Alamat: Jl. Ade Irma Suryani Blok B No. 01 RT.04 Kel. Sungai Pinang Dalam - Kec. Sungai Pinang.

Orang Tua:

- Bapak: M. Soemardi (Almarhum) (Ketua RT 35 Gang Family, Ketua LPM Mugirejo)
- Ibu: Aisyah Mertua:
- Bapak Mertua: H. Riduansyah (Almarhum) (Kontraktor PLN)
- Ibu Mertua: Hj. Nurjannah Istri: Julia Merisya, ST (Icha) (Alumni Fakultas Teknik Unmul 2007)
- Pekerjaan Istri: Owner Westudio, Poundpro Westudio, Penyiar Radio Suara Mahakam, Moderator & MC (Master of Ceremony)
- Anak:
- 1. Divania Zahratusyfa - Dzakia Aulia Putri
- 2. Dzakira Amalia Putri - Athaya Elysia Wibowo

Riwayat Pendidikan:

- STIH Awang Long Samarinda 2020
- STIE Manado 2001 - 2004
- UNMUL Fak. Ekonomi 2000 - 2001
- SMU Negeri 2 Samarinda 1996 - 1999
- SMP Negeri 11 Samarinda 1993 - 1996
- SD Negeri 057 Samarinda 1987 - 1993

Riwayat Pekerjaan:

- Dirut CV. Semoga Sukses 2011 - Sekarang
- Dir Opr PT. Borneo Bintang Perkasa 2017 - Sekarang
- Dirut CV. Borneo Bintang Perkasa 2017 - Sekarang
- Area Manager Honda Semoga Jaya Kaltim 2012 - 2017
- Manager Marcom Honda Semoga Jaya Kaltim 2010 - 2012
- Head Corcom Honda Semoga Jaya Kaltim 2008 - 2010
- Fleet Manager Ford Motor Kalimantan 2007 - 2008
- Supervisor Ford Motor Kalimantan 2006 - 2007

- Senior CMO PT. Tunas Finance 2005 - 2006
- Sales Executive Chevrolet 2002 - 2005
- Bank Assurance Depart AIG Lippo 2001 - 2003
- Pengajar Komputer LPK Brawijaya 2000 - 2003

Riwayat Organisasi:

- Sekretaris AMPI Kaltim 2023 - Sekarang
- Ketua AMPI Samarinda 2021 - Sekarang
- Ketua Dept ESDM HIPMI Kaltim 2021 - Sekarang
- Wakil Ketua HPN Kaltim 2018 - Sekarang
- Pemenang Pemilu Golkar Dapil IV SMD 2016 - 2021
- Sekertaris LMP Kota Samarinda 2015 - Sekarang
- Pendiri Ikatan Motor Honda Samarinda 2012 - Sekarang
- Anggota Panca Marga Kota Samarinda 2007 - 2012
- Ketua Tiger Club Samarinda (TCS) 2005 - 2008
- Pendiri Tiger Club Samarinda (TCS) 2005 - Sekarang. (RS)



KASUS 21 IUP PALSU, TANTANGAN PJ GUBERNUR AKMAL DALAM PENANGANAN TAMBANG ILEGAL

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) segera memetakan permasalahan aktivitas pertambangan ilegal di provinsi tersebut untuk mencari solusi yang tepat guna kepentingan hajat orang banyak.

"Kami harap ada solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan menyangkut hajat hidup orang banyak yang dirugikan oleh aktivitas pertambangan ilegal," kata Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik di Samarinda, Selasa.

Akmal mengaku dirinya belum mengetahui secara detail potensi dan permasalahan tambang ilegal di daerah itu, dan akan berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat.

"Masyarakat Kaltim juga hidup dari pertambangan. Kaltim memiliki potensi pertambangan yang besar dan menjadi sumber penghasilan bagi banyak orang," ujarnya.

Menurut dia, terkait dampak negatif dari aktivitas pertambangan ilegal, pihaknya akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada pemerintah pusat.

Akmal menuturkan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, kabupaten dan kota untuk menangani permasalahan tambang ilegal itu.

Sebelumnya, anggota DPRD Kalimantan Timur M. Udin mendesak penjabat Gubernur Kaltim untuk menindaklanjuti kasus dugaan 21 izin usaha pertambangan (IUP) palsu.

"Kami berharap kepemimpinan Akmal Malik memberikan informasi yang sedetail-detailnya kepada Polda Kaltim, sampai permasalahan 21 IUP palsu itu selesai," kata Udin.

Mantan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim itu mengatakan kasus 21 IUP palsu sudah berlangsung lama, dan merugikan negara serta masyarakat.

"Sampai saat ini, belum ada tindak lanjut yang berarti dari pemerintah terkait aktivitas penambangan ilegal batu bara," ujarnya.

Berdasarkan catatan dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim menyebut hingga 2023 sebanyak 45 kasus korban meninggal akibat aktivitas pertambangan ilegal itu. (ANT/MK)



KANWIL PAJAK KALTIMTARA SITA ASET PENUNGGAK PAJAK RP3,8 MILIAR

SAMARINDA - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara) berkoordinasi dengan delapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di daerah ini menyita aset penunggak pajak senilai Rp3,8 miliar.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil Ditjen Pajak Kaltimtara Teddy Heriyanto di Samarinda, Selasa, mengatakan penyitaan aset merupakan upaya terakhir dalam penagihan pajak. Sebelumnya, wajib pajak telah diberikan surat teguran dan surat paksa untuk melunasi utang pajak.

"Aset yang disita meliputi lima unit kendaraan bermotor, tiga bidang tanah, sejumlah uang dalam rekening bank, dan dua unit kendaraan alat berat. Aset-aset tersebut milik 12 wajib pajak yang memiliki tunggakan totalnya sebesar Rp24,7 miliar," ucap Teddy.

Dia menjelaskan penyitaan aset dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Ia mengatakan penyitaan aset bertujuan untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak.

"Jika tidak segera dilunasi, kami akan menjual aset tersebut melalui lelang umum," kata Teddy.

Teddy menambahkan penagihan pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Ia mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami mengapresiasi wajib pajak yang telah taat membayar pajak. Bagi yang belum taat, kami akan terus melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tegas Teddy. (ANT/MK)



POLISI TANGKAP PELAKU PENCURIAN SPAREPART ALAT BERAT DI SAMARINDA

SAMARINDA - Unit Opsnal Polsek Samarinda Ulu berhasil mengungkap kasus pencurian sparepart alat berat. Kapolsek Samarinda Ulu, AKP Yasir, SH., mengungkapkan bahwa peristiwa pencurian terjadi pada Minggu, 15 Oktober 2023, sekitar pukul 13.30 WITA, di halaman parkir PT. Intan Permata Sejati di Jalan MT. Haryono, Perum Bukit Mediterania, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda.

"Pelaku mencuri sparepart alat berat ekskavator dan 5 buah aki/accu berbagai merk," katanya.

Kejadian ini baru diketahui pelapor ketika menutup kantor. Ia melihat bahwa sejumlah sparepart yang berada di halaman parkir mengalami pengurangan jumlahnya.

Dengan pemeriksaan CCTV, diketahui bahwa seorang pria telah berulang kali memasuki halaman parkir kantor, mengambil barang-barang tersebut, dan membawanya pergi. Akibat tindakan pencurian ini, pelapor mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,-.

Pelapor segera melaporkan insiden tersebut kepada Polsek

Samarinda Ulu, dan ditindaklanjuti dengan olah TKP dan penyelidikan lebih lanjut. Hasilnya, mereka berhasil menangkap satu orang pelaku pencurian dan mengamankan barang bukti yang diperlukan untuk proses hukum lebih lanjut.

Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi 1 buah sparepart alat berat dan 5 buah aki/accu. Pelaku yang diamankan adalah pria berusia 29 tahun dengan inisial (PPP), yang tinggal di Jalan Rotan Pulut, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. (MK)

**Deluxe Room**

ONLY

~~Rp 698.000,-~~**30% OFF****Rp 488rb**

NETT/NIGHT

benefits**Breakfast**
2 pax**FREE****Laundry**
Up To 2 pcs**FREE****Kopi Inspirasi**
Buy 3, Pay 2**FREE****Afternoon
Tea****FREE****Mini Mantou**
5 pcs**BOOK NOW****0811 581 3669**www.hotelgrandkartika.com